

BAB III
SEJARAH SURAT KABAR BUMIPUTRA
SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN 1930-AN

A. Perkembangan Surat Kabar Bumiputra sampai dengan Awal Tahun 1930-an

Perkembangan surat kabar secara umum di Hindia Belanda sudah dimulai dari pertengahan abad ke-19, yakni pada saat kemunculan surat-surat kabar swasta. Pers cetak yang terbit pada waktu itu masih didominasi oleh orang-orang Eropa. Hal itu disebabkan oleh kepemilikan mesin cetak yang terbatas hanya di kalangan orang-orang Eropa. Selain itu, pengawasan terhadap media cetak juga dilakukan dengan ketat oleh pemerintah kolonial sehingga sangat sulit untuk melakukan suatu kegiatan penerbitan di kalangan selain orang Eropa. Namun, seiring dengan berkembang dan menguatnya pengaruh kaum liberal di Hindia Belanda pada penghujung abad ke-19 perkembangan surat kabar swasta berkembang dengan pesat.

Surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-19 tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan informasi kalangan orang-orang Eropa, tetapi juga untuk keperluan penyebaran agama Kristen dan pendidikan, serta

kebudayaan Barat di kalangan elit bumiputra. Penerbitan surat kabar itu juga tidak terlepas dari motif ekonomi yakni mencari pelanggan baru.⁸⁷ Isi surat kabar swasta yang terbit pada periode itu pada umumnya meliputi masalah pendidikan kaum bumiputra. Hal itu menjadi minat di kalangan elit bumiputra karena pada waktu itu pendidikan Barat merupakan suatu hal yang menarik guna memperoleh peningkatan taraf hidup dan status sosial.

Kategori surat kabar yang muncul berikutnya adalah surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang Tionghoa. Penerbitan tersebut salah satunya dilatarbelakangi salah satunya oleh kesadaran identitas yang muncul di kalangan etnis Tionghoa yang berada di Hindia Belanda. Hal itu juga ditunjang oleh kondisi keuangan orang-orang Tionghoa yang berkecukupan untuk menopang biaya penerbitan. Faktor krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1884, yang menyebabkan jatuhnya harga kopi dan gula di pasaran menjadikan usaha percetakan dan penerbitan sebagai usaha alternatif bagi pengusaha Tionghoa. Penerbitan pers Tionghoa dimulai pada saat dibelinya perusahaan percetakan Gebroeders Gimberg & Co beserta hak penerbitan *Bintang Timor* oleh Baba Tjoa Tjoan Lok tahun 1886.⁸⁸

⁸⁷ Seperti yang dilakukan oleh C.F. Winter Sr. dan putranya, Gustaaf Winter, yang menerbitkan surat kabar berbahasa daerah pertama (bahasa Jawa *kromo inggil*), *Bromartani* dan *Poespitamantjawarna*, pada tahun 1855. Mereka mencoba menerbitkan surat kabar yang ditujukan khusus kepada kaum elit bumiputra dengan harapan mendapat pelanggan selain orang Belanda dan Eropa. Setelah munculnya *Bromartani*, maka penerbitan surat-surat kabar berbahasa daerah dan kemudian berbahasa anak negeri (Melayu Rendah) bermunculan. Surat kabar tersebut di antaranya *Selompret Melajoe* (1860) dan *Bintang Timor* (1862). Sedangkan salah satu contoh surat kabar yang diterbitkan oleh misionaris Kristen adalah *Bianglala* (1852) dan *Tjahaja Siang* (1868). Lihat: Ahmat Adam, *op.cit.*, hal. 27-28.

⁸⁸ Orang-orang Tionghoa merupakan kelompok pelanggan yang kuat terhadap surat-surat kabar yang tumbuh pada pertengahan abad ke-19. Surat kabar yang terbit merupakan media iklan, informasi komersial dan perdagangan eceran yang diminati oleh pedagang Tionghoa. Sementara itu partisipasi orang Tionghoa dalam penerbitan surat kabar dimulai pada tahun 1869, ketika Lo Tun Tay menjadi

Secara umum, penerbitan surat kabar Tionghoa tidak lepas dari fungsi dasarnya yang bersifat komersial, yakni sebagai tempat promosi (iklan) dari usaha yang dijalani oleh komunitas Tionghoa.

Menjelang abad ke-20, orang-orang bumiputra yang diwakili oleh kaum elitnya yang terpelajar sudah banyak yang berkecimpung dalam dunia surat kabar, baik surat kabar Eropa maupun surat kabar Tionghoa.⁸⁹ Mereka pada umumnya menjabat sebagai redaksi, bahkan ada yang menjadi kepala redaksi dari surat-surat kabar tersebut.⁹⁰ Melalui keterlibatannya dalam surat-surat kabar Eropa dan Tionghoa itulah, kemudian orang-orang bumiputra tersebut mampu menerbitkan surat kabarnya sendiri pada awal abad ke-20.⁹¹ Salah seorang yang dianggap pelopor adalah R.M. Tirta Adhi Soerjo yang menerbitkan *Soenda Berita* pada tahun 1903 dan menerbitkan surat kabar yang kritis terhadap birokrasi pemerintah kolonial, *Medan Prijaji*, pada tahun 1907.⁹²

editor untuk surat kabar dwimingguan, *Mataharie*, yang diterbitkan oleh percetakan Bruining & Wijt di Batavia. Sampai saat itu minat orang Tionghoa terhadap penerbitan pers cetak hanya sebatas menulis surat, menyumbang berita, dan bekerja sebagai penata huruf. Lihat: *ibid.*, hal. 101-109.

⁸⁹ Mengenai munculnya golongan elit baru terkait dengan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat pribumi dalam rangka mewujudkan Politik Etis pada akhir abad ke-19, lihat: Robert van Niel, *op.cit.*, hal. 70—102.

⁹⁰ Di antaranya adalah F.D.J.Pangemanan (redaksi *Kabar Perniagaan*), J.P.H.Pangemanan (pimpinan redaksi *Warna Warta*), Datoek Soetan Maharadja (redaksi *Tjahaja Soematra*), Raden Ngabehi Tjitro Adiwino (pimpinan *Pewarta Hindia*) dan R.M. Tirta Adhi Soerjo (redaksi *Pembrita Betawi*). Lihat: Abdurrahman Surjomiharjo, *et.al.*, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 61—84.

⁹¹ Surat kabar yang dikelola secara langsung oleh orang-orang bumiputra. Surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang bumiputra tersebut kemudian disebut sebagai surat kabar bumiputra.

⁹² Mengenai gambaran kehidupan dari R.M. Tirta Adhi Soerjo dapat dilihat dalam novel yang mempunyai latarbelakang situasi sejarah berjudul *Sang Pemula* karya Pramoedya Ananta Toer. Selain itu juga disebutkan dalam Abdurrahman Surjomiharjo, *et.al.*, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 82—84; dan Ahmat Adam, *op.cit.*, hal. 183—210.

Pada tahun 1902, sebelum R.M. Tirto Adhi Soerjo menerbitkan surat kabar pertamanya, Abdul Rivai memimpin surat kabar *Bintang Hindia* bersama seorang Belanda yang menganut aliran etis, Clockener Brousson.⁹³ Meskipun surat kabar tersebut diterbitkan bukan oleh orang bumiputra dan bahkan mendapat dana dari Gubernur Jenderal Van Heutsz yang berkuasa pada saat itu, *Bintang Hindia* di bawah pengaruh Abdul Rivai memuat tulisan-tulisannya yang kritis terhadap kondisi orang-orang bumiputra di tanah jajahan. Tulisan-tulisan itu mampu memengaruhi orang-orang bumiputra yang membaca surat kabar tersebut. Brousson bersama Rivai memang mempunyai kesamaan visi bahwa surat kabar tersebut memang harus menjadi media yang membangkitkan semangat kaum bumiputra untuk maju dan bersaing dengan orang-orang Tionghoa, Arab, bahkan Eropa. Pada tahun 1906, Rivai meninggalkan *Bintang Hindia* untuk meneruskan studinya ke Belanda. Hal itu memengaruhi penerbitan *Bintang Hindia* sehingga dalam beberapa tahun kemudian daya tarik *Bintang Hindia* menurun drastis.

Pada dasawarsa kedua abad ke-20, kaum bumiputra mulai menjadikan surat kabar sebagai sarana untuk menyampaikan suara organisasi kaum bumiputra yang mulai tumbuh. Pada tahun 1910 organisasi pemuda Budi Utomo Cabang Surakarta membeli surat kabar *Darmo Kondo* yang sebelumnya dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa, Tan Tjoe Kwan, dan dipimpin oleh seorang redaksi yang mahir dalam soal

⁹³ Ahmat Adam. *op.cit.*, hal.167-181; Harry A. Poeze, "Early Indonesian Emancipation: Abdul Rivai, Van Heutsz and the Bintang Hindia", BKI vol. 145, no. 1 (1989), hal. 87—106.

sastra Jawa, Tjhie Siang Ling.⁹⁴ Surat kabar itu kemudian mendapatkan pelanggan yang cukup banyak di kalangan masyarakat Jawa. Namun pemberitaannya yang bersifat tenang dan cenderung tidak peka terhadap kondisi zaman membuat surat kabar itu kalah bersaing dengan terbitnya surat kabar Sarekat Islam, *Oetoesan Hindia*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1913 di Surabaya. Surat kabar *Oetoesan Hindia* mempunyai isi yang lebih berani dibandingkan dengan *Darmo Kondo* dan menarik minat masyarakat bumiputra. Oleh karena itu, surat kabar itu kerap terkena delik pers dan berurusan dengan pengadilan. Dalam rentang waktu tiga belas tahun, isi *Oetoesan Hindia* mencerminkan dunia pergerakan politik, ekonomi, dan perburuhan, terutama yang dipimpin oleh Central Sarekat Islam.⁹⁵ Surat kabar Sarekat Islam lainnya adalah *Sinar Djawa* di Semarang, *Pantjaran Warta* di Betawi, dan *Saroetomo* di Surakarta.

Berdirinya Indische Partij pada 12 Desember 1912 memberikan pengaruh tersendiri terhadap beberapa surat kabar yang terbit. *Tjaja Timoer* di Malang, *Doenia Bergerak*, dan juga *Kaoem Moeda* di Bandung dengan masing-masing redaktornya Raden Djojosoediro, Mas Marco Dikromo, dan Abdul Moeis, menunjukkan ketertarikannya terhadap pemikiran nasionalis Indische Partij yang cukup radikal.⁹⁶ Organisasi itu juga menerbitkan medianya sendiri yakni majalah dua mingguan *Het Tijdschrift* dan surat kabar *De Expres*. Dalam surat kabar tersebut terdapat tulisan-

⁹⁴ Abdurrahman Surjomiharjo, *et.al.*, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 85.

⁹⁵ *ibid.*

⁹⁶ Ahmat Adam, *op.cit.*, hal. 275-280.

tulisan dari para tokoh Indische Partij, di antaranya adalah tulisan dari Douwes Dekker yang cerdas, bersemangat, dan mempunyai nuansa politik. Selain itu, ada pula tulisan-tulisan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo di dalam *Het Tijdschrift* yang dianggap mampu membawa pemikiran kritis dan terarah kepada para pembacanya. Oleh karena itu, beberapa surat kabar bumiputra menjadikan surat kabar yang diterbitkan oleh Indische Partij itu sebagai contoh. Kritik-kritik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indische Partij menuai tindakan hukum dari pemerintah kolonial. Para tokoh Indische Partij terkena sanksi berupa pembuangan. Namun, pembuangan itu tidak membuat mereka berhenti menyuarakan pemikirannya yang kritis terhadap pemerintah kolonial. Tjipto Mangoenkoesoemo masih mampu untuk menerbitkan majalah berbahasa Belanda *De Indier* (1913—1914) dalam masa pembuangannya, begitu pula dengan R.M. Soewardi Soerjaningrat yang juga menerbitkan majalah *Hindia Poetra* (1916).

Lahirnya PKI pada tahun 1920 membuat jumlah surat kabar yang mempunyai latar belakang ideologi partai bertambah. Surat kabar yang diterbitkan PKI memuat agitasi dan propaganda partai untuk membangkitkan kegelisahan sosial yang berpengaruh sampai di tingkat lokal di seluruh pelosok wilayah Hindia Belanda, termasuk daerah di luar Pulau Jawa. Pada akhir tahun 1926, tercatat lebih dari 20 penerbitan yang dilakukan oleh PKI.⁹⁷ Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dalam rentang tahun 1926—1927 telah membuat partai tersebut dinyatakan sebagai

⁹⁷ Abdurrahman Suryomiharjo, *et.al.*, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 88.

partai terlarang dan sebagai akibatnya, media-media PKI yang radikal dan agresif juga dilarang terbit oleh pemerintah kolonial.

Sesudah pemberontakan PKI, surat-surat kabar moderat mencoba mengambil perhatian pembaca, seperti *Darmo kondo* dari BU dan *Bintang Timoer* yang merupakan surat kabar netral. Namun, surat-surat kabar tersebut tidak memenuhi kebutuhan akan semangat nasionalisme para pembaca bumiputra yang mulai timbul. PSI dengan organnya *Fadjar Asia* berupaya mengambil alih pimpinan gerakan massa.⁹⁸ Namun demikian, perhatian para pembaca yang tertarik kepada dunia pergerakan mulai beralih kepada majalah *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh PI di Belanda.⁹⁹ Majalah tersebut memperkenalkan istilah Indonesia dalam kata pengantar edisi pertamanya. Melalui artikel-artikelnya, *Indonesia Merdeka* memperkenalkan nasionalisme yang lebih jauh kepada para pembacanya.

Penyebaran surat kabar tersebut dilakukan secara rahasia di Hindia Belanda dan penyebarannya ialah Soedjadi yang diangkat sebagai propagandis PI di Hindia Belanda.¹⁰⁰ Meskipun PI tidak mempunyai cabang di Hindia Belanda, pengaruh pemikirannya terhadap pergerakan nasional dapat mencapai Hindia Belanda melalui majalah tersebut. Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studieclub*) di Surabaya dan Kelompok Studi Umum (*Algemeene Studieclub*) di Bandung merupakan dua tempat berkumpul para kaum terpelajar bumiputra yang anggotanya pernah menjadi

⁹⁸ Mirjam Maters, *op.cit.*, hal. 244.

⁹⁹ Diterbitkan dalam dua bahasa, Belanda dan Indonesia (Melayu). Namun edisi yang berbahasa Indonesia hanya diterbitkan sebanyak lima edisi saja. Lihat: Abdurrahman Surjomohardjo, *et.al.*, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 92—93.

¹⁰⁰ *ibid.*

anggota dan mendapat pengaruh dari perjuangan PI di Belanda. Kelompok tersebut merupakan golongan nasionalis sekuler yang muncul dan mengambil alih perhatian pergerakan nasional setelah dilarangnya PKI pada pertengahan dasawarsa tahun 1920-an. Kelompok Studi Indonesia di Surabaya menerbitkan *Soeloeh Ra'jat Indonesia*.¹⁰¹ Sementara itu, Kelompok Studi Umum di Bandung, pada bulan Desember 1927 menerbitkan *Soeloeh Indonesia Moeda*. Kelompok Studi Umum Bandung kemudian mendirikan PNI, sebuah partai yang sudah mempunyai tujuan lebih jauh dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia. PNI kemudian mulai menerbitkan surat kabarnya sendiri yang bernama *Persatoean Indonesia*.¹⁰²

Penggambaran mengenai kondisi perkembangan pers bumiputra dapat dilihat dari sebuah brosur yang terbit pada tahun 1929. Brosur tersebut ditulis oleh salah satu wartawan bumiputra yang bernama M. Tabrani berjudul *Ons Wapen: De Nationaal Indonesische Pers en Hare Organisatie*.¹⁰³ Tabrani memberikan gambaran mengenai pers bumiputra yang dianggapnya masih kurang mutunya dari segi isi dan bentuk fisiknya. Walaupun demikian, dasawarsa tahun 1920-an telah memperlihatkan

¹⁰¹ Penerbitan *Soeloeh Ra'jat Indonesia* dilatarbelakangi oleh ketidakcocokan antara Soetomo dan Soekarno dalam pembentukan sebuah majalah gabungan antara dua studi klub yang sebenarnya mempunyai kecenderungan berbeda dalam cara bergerak tetapi mempunyai titik tolak yang sama. Ketidakcocokan tersebut disebutkan oleh salah satu pemimpin redaksinya, Tjandarboemi, terletak dalam hal personalia. Nama *Soeloeh Indonesia Moeda* itu sendiri merupakan gabungan antara majalah pribadi Soetomo yang berjudul *Soeloeh Indonesia* (diterbitkan tahun 1925) dengan majalah kelompok pemuda Bandung yang dipimpin oleh Soekarno berjudul *Indonesia Moeda*. Lihat: R.T. Tjandarboemi, "Soeara Oemoem" dalam Kasus Delik Pers "Kapal Tujuh", dalam *Bunga Rampai Sejarah Media Massa*, (Editor Dja'far Husein Assegaff), (Jakarta, 1978), hal. 143—145.

¹⁰² Modal awal surat kabar itu, lima ratus gulden, dikumpulkan dari lima cabang PNI. Beberapa surat kabar yang terbit kemudian dan menyatakan bersimpati terhadap PNI adalah *Djanget* yang diterbitkan di Yogyakarta dan *Matahari Indonesia*. Di Surabaya juga terbit surat kabar yang bersimpati terhadap PNI, yaitu *Indonesia Bersatoe*. Lihat: Mirjam Maters, *op.cit.*, hal 243—253.

¹⁰³ Abdurrahman Surjomihardjo, *et.al*, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 93—96.

perkembangan surat kabar bumiputra yang pesat. Hal itu ditunjukkan dengan penerbitan surat kabar oleh hampir semua organisasi bumiputra, baik yang melakukan penerbitan secara langsung maupun tidak langsung. Namun umur surat kabar bumiputra kebanyakan tidak berumur panjang. Surat kabar bumiputra silih berganti bermunculan dan menghilang. Salah satu hambatannya adalah kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh masyarakat bumiputra tidak mempunyai kelas menengah yang cukup untuk menunjang penerbitan tersebut.¹⁰⁴

Memasuki dasawarsa tahun 1930-an, perkembangan surat kabar bumiputra tidak jauh berbeda dengan perkembangan sepanjang akhir dasawarsa tahun 1920-an. Surat-surat kabar bumiputra yang terbit kebanyakan masih berperan sebagai suara organisasi. Perkembangan itu ditunjukkan dengan bertambahnya surat kabar bumiputra bersifat netral yang ruang lingkupnya nasional. Selain *Bintang Timoer* yang dikelola oleh Parada Harahap, terbit pula surat kabar netral lainnya seperti *Aksi*, *Sedyotomo*, *Pemandangan*, *Soeara Oemoem*, dan lainnya. Walaupun demikian, selain *Bintang Timoer*, surat-surat kabar netral lainnya kebanyakan masih dipengaruhi oleh organisasi yang ada melalui tokoh-tokoh yang ikut mengelola surat kabar itu.

Kalangan pergerakan nasionalis sekuler pada dasawarsa tahun 1930-an juga menerbitkan surat kabarnya masing-masing. *Persatoean Indonesia* yang dulunya merupakan media aspirasi PNI, pada awal dasawarsa tahun 1930-an menjadi media aspirasi Partindo yang merupakan partai nonkooperasi baru. Organisasi nonkooperasi

¹⁰⁴ Kelas menengah tersebut merupakan orang-orang yang mampu berlangganan surat kabar. Selain itu juga merupakan orang-orang yang mampu memanfaatkan surat kabar sebagai media iklan usahanya. Lihat: *ibid.*

lainnya, PNI-Baru, memiliki surat kabar *Kedaulatan Ra'jat* sebagai wadah informasi organisasinya dan menaungi surat kabar *Daulat Ra'jat*. Selain itu, PNI-Baru juga memiliki surat kabar lain di beberapa cabangnya.¹⁰⁵ Sementara itu, kelompok nasionalis sekuler yang lain, seperti PBI yang dipimpin oleh Soetomo, memiliki surat kabar *Soeara PBI* sebagai wadah informasi organisasinya dan menaungi surat kabar *Soeara Oemoem*.

Perkembangan lainnya adalah upaya mendirikan organisasi persatuan wartawan bumiputra yang cukup kuat seperti Perkoempoelan Kaoem Djoernalist (PKJ) pada tahun 1931 dan kemudian beralih kepada Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi) pada bulan Desember 1933.¹⁰⁶ Pendirian Perdi bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan peranan pers sebagai alat untuk menegakkan persatuan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat bumiputra. Pada anggaran dasarnya disebutkan bahwa dalam keanggotaannya, haluan politik tidak dipersoalkan dan tidak akan disinggung sehingga Perdi mampu menyerap banyak anggota dari berbagai jenis surat kabar.¹⁰⁷

Pada awal dasawarsa tahun 1930-an, dunia surat kabar bumiputra menghadapi hambatan berupa peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Peraturan tersebut adalah *Persbreidel Ordonnantie* yang diumumkan dalam *Staatsblad* pada

¹⁰⁵ Terdapat lima surat kabar yang terbit yakni *Banteng Ra'jat* di Yogyakarta, *Api Ra'jat* di Surakarta, *Marhaen* di Bandung. Lihat: Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hal. 163.

¹⁰⁶ Sebelumnya terdapat pula *Inlandsche Journalisten Bond* (IJB) yang dibentuk pada tahun 1914, *Indische Journalisten Bond* yang dibentuk oleh Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1919, *Perserikatan Journalisten Asia* (1928) yang dipimpin oleh R. Soedjoedi. Lihat: Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, (Jakarta, 1988), hal. 44.

¹⁰⁷ *ibid.*, hal. 45.

tanggal 7 September 1931.¹⁰⁸ Peraturan tersebut memungkinkan pemerintah kolonial untuk mengeluarkan larangan mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan suatu majalah atau surat kabar apabila mengganggu ketertiban umum. Peraturan tersebut baru dijalankan sepenuhnya pada tahun 1933 ketika keadaan politik menjadi lebih tidak stabil dengan terjadinya beberapa peristiwa.

Surat-surat kabar bumiputra pada awal dasawarsa tahun 1930-an memang sangat merespon peristiwa yang terjadi dan selalu mengeluarkan protes dan kritik yang keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Sebagian besar isi surat kabar bumiputra pada waktu itu membahas kondisi rakyat bumiputra yang terpuruk akibat kebijakan pemerintah kolonial yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi dunia. Beberapa peristiwa yang mendorong pemerintah kolonial untuk melakukan tindakan represif adalah aksi penentangan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” tahun 1932 yang meluas dan yang terpenting adalah pemogokan awak kapal “De Zeven Provinciën” yang dianggap sebagai pemberontakan. Pemberitaan yang dilakukan oleh surat-surat kabar bumiputra sepanjang tahun 1933 mengundang tindakan represif pemerintah. Pembredelan tidak hanya mengenai surat kabar yang menyuarakan nonkooperasi, tetapi juga surat kabar yang moderat. Hal itu membuat perkembangan surat kabar bumiputra berjalan pelan. Surat-surat kabar yang menyuarakan gerakan nonkooperasi menjelang pertengahan dasawarsa tahun 1930-an ikut menghilang bersamaan dengan hilangnya partai atau organisasi nonkooperasi yang juga dilarang tumbuh oleh pemerintah kolonial.

¹⁰⁸ Mirjam Maters, *op.cit*, hal. 290.

B. Sejarah Surat Kabar Pergerakan Nasionalis Sekuler

B.1. *Soeara Oemoem*

Soeara Oemoem merupakan surat kabar yang diterbitkan dari gabungan surat kabar mingguan Kelompok Studi Indonesia yang bernama *Soeloeh Ra'jat Indonesia* di Surabaya dengan sebuah surat kabar berbahasa Jawa dan Madura bernama *Swara Oemoem* yang dipimpin oleh Raden Pandji Sosrokardono.¹⁰⁹ Nomor pertama *Soeara Oemoem* ini terbit pada tanggal 1 Oktober 1931. *Soeara Oemoem* pada waktu itu diterbitkan dalam dua edisi, yaitu edisi berbahasa Jawa dan edisi berbahasa Indonesia. Pimpinan redaksi *Soeara Oemoem* berbahasa Indonesia diserahkan kepada Raden Taher Tjindarboemi yang sebelumnya merupakan pemimpin *Soeloeh Ra'jat Indonesia*.¹¹⁰ Sementara itu edisi *Soeara Oemoem* berbahasa Jawa dipimpin oleh Raden Pandji Sosrokardono.¹¹¹ Namun demikian, edisi *Soeara Oemoem* berbahasa Jawa dihentikan penerbitannya mulai bulan April 1932, sehingga *Soeara Oemoem* hanya terbit satu edisi saja, yakni edisi berbahasa Indonesia.¹¹² Penerbitan *Soeara Oemoem* ini disebutkan sebagai persatuan antara kaum intelek dan rakyat.

¹⁰⁹ *Soeara Oemoem*, 1 Oktober 1931 no. 1.

¹¹⁰ R.T. Tjindarboemi dilahirkan pada tahun 1902. Keluarganya berasal dari Gunung Sugih, daerah Lampung Tengah. Tjindarboemi pernah mengenyam pendidikan di STOVIA dan NIAS. Pengalamannya di bidang jurnalistik dimulai pada *De Indische Courant* yang terbit di Surabaya, kemudian berlanjut di *Kemadjoean Hindia* bersama Raden Pandji Soeroso. Lihat: I.N. Soebagijo, *op.cit.*, hal. 71—72.

¹¹¹ Raden Pandji Sosrokardono merupakan salah seorang yang terlibat dalam kasus S.I. *Afdeling B*. Setelah selesai menjalani masa hukuman, ia kemudian memimpin surat kabar *Swara Oemoem* yang berbahasa Jawa. Sosrokardono kemudian memimpin *Soeara Oemoem* edisi bahasa Jawa setelah terjadi penggabungan dengan *Soeloeh Ra'jat Indonesia*. Lihat: *ibid.*, hal. 73.

¹¹² *Soeara Oemoem*, 16 Maret 1932 no. 115.

“ Djadi persatoean Sri dengan Sw.O. jang pertama mendjelma djadi Soeara Oemoem bagian bahasa Indonesia dan jang kedoea mendjadi Soeara Oemoem tetap bahasa Djawa dengan perobahan penerbitannja (seminggoe terbit 6 kali, terhitoeng hari Djoem’at, jang tadinja tidak diterbitkan) inilah semata-mata soeatoe perpenoehan akan perdjandjian hidoep itoe boekan sadja, akan tetapi djoega soedah sesoeai dengan kodrat, bahwa antara kaoem intelek dan kaoem kromo mesti ada itoe persatoean roch goena mengedjar semoea perbaikan jang dapat boeat bekal dalam perdjalanan bangsa Indonesia menoe djoe pada deradjat jang sempoeana.”¹¹³

Surat kabar *Soeara Oemoem* dijalankan oleh usaha penerbit yang menggunakan bentuk N.V. (*naamloze vennotschap*/perseroan terbatas) bernama “Peroesahaan Swara Oemoem dan Soeloeh Ra’jat Indonesia”.¹¹⁴ Selain Tjindarboemi dan Sosrokardono yang menjadi redaksi utama, jabatan direktur surat kabar dipegang oleh R.P.S. Gondokoesoemo, sedangkan jabatan dewan komisaris dipegang oleh Soetomo dan R. Ng. Soebroto. Redaksi *Soeara Oemoem* pada waktu itu adalah Armijn Pane, J.D. Sjaranamoel yang menggunakan inisial J.D.S., Achmad Darmawan Loebis, Raden Mas Abdoel Wahab, Goesti Madjoer, dan S.M. Latief.¹¹⁵

Soeara Oemoem memiliki visi dan misi untuk menjadi sebuah media yang dapat menjadi penyalur aspirasi dan jembatan antara berbagai golongan pergerakan yang ada di dalam masyarakat bumiputra. Tjindarboemi dalam pengantar edisi pertama *Soeara Oemoem* menyatakan bahwa *Soeara Oemoem* membela kepentingan umum kaum bumiputra untuk mewujudkan kesejahteraan kaum bumiputra serta

¹¹³ *Soeara Oemoem*, 3 Oktober 1932 no. 3; Sri yang dimaksud dalam kutipan artikel ini adalah *Soeloeh Ra’jat Indonesia* yang merupakan media terbitan Kelompok Studi Indonesia dan Sw. O adalah *Swara Oemoem*, sebuah surat kabar berbahasa Jawa yang terbit di daerah Surabaya dan Madura.

¹¹⁴ *Soeara Oemoem*, 1 Oktober 1932 no. 1.

¹¹⁵ Soebagijo I.N., *op.cit.*, hal. 73; R.T. Tjindarboemi, *op.cit.*, hal. 145.

menjadi cermin dari tanah air dan bangsa, seperti yang diungkapkan dalam kata pengantar edisi perdananya:

“ Dagblad Nasional ini haroes mendjadi tjermin dari apa jang hidoep di Indonesia ini, mentjerminkan tanah air dan bangsanja.

Mentjerminkan angan-angan, tjita-tjitanja tanah air ini dan bangsanja jang disendikan kepada keboedajaan, haloes boedi bahasa, boedi pekerti dan lain-lain kekajaan jang ada di dalam dadanja bangsa kita Indonesia.

. . . . Dagblad Nasional ini haroes berdiri di atas partai-partai satoe-satoenja mengemoekakan kepentingan oemoem di dalam arti jang sehat dan benar.”¹¹⁶

Tjindarboemi menyatakan bahwa *Soeara Oemoem* bukan merupakan organ PBI dan tidak digunakan untuk keperluan PBI, melainkan digunakan untuk keperluan kebangsaan seumumnya.¹¹⁷ Meskipun demikian, *Soeara Oemoem* seringkali dalam artikelnya memperlihatkan pandangan yang berdasarkan atas pandangan PBI dan senantiasa memberikan gambaran bahwa PBI merupakan organisasi yang program-programnya sesuai dengan kebutuhan rakyat bumiputra.¹¹⁸ Sifat *Soeara Oemoem* yang ditujukan kepada segala golongan ini diragukan oleh surat kabar *Pertja Selatan* karena hampir semua orang-orang yang mengurus *Soeara Oemoem* adalah orang-orang PBI.¹¹⁹ Tjindarboemi menyangkal keraguan itu dengan menuliskan bahwa pengurus *Soeara Oemoem* memang mayoritas orang-orang PBI, tetapi dalam pelaksanaannya mampu membedakan kepentingan organisasi dengan kepentingan lainnya. Meskipun demikian, surat kabar *Soeara Oemoem* dalam praktiknya tetap dibawah pengaruh Soetomo. Pengaruh seperti ini menimbulkan ketidaksukaan di

¹¹⁶ *Soeara Oemoem*, 1 Oktober 1932 no. 1.

¹¹⁷ *Soeara Oemoem*, 2 Oktober 1932 no. 2.

¹¹⁸ *ibid.*

¹¹⁹ *Soeara Oemoem*, 5 Oktober 1932 no. 5.

dalam redaksi *Soeara Oemoem* yang memegang teguh prinsip kepentingan umum dan objektivitas, sehingga Armijn Pane yang merupakan salah satu redaktur utama *Soeara Oemoem* mengundurkan diri.¹²⁰ Tjindarboemi sendiri dalam tulisannya yang dimuat dalam majalah “Pers Indonesia” mengakui bahwa *Soeara Oemoem* sejak awal sudah memegang peran untuk menyuarakan aspirasi Soetomo dan kelompoknya.

“Kita saksikan adanya s.s.k. (harian maupun majalah) yang masing-masing menganut politik lingkungannya sendiri. Ada harian atau majalah yang menganut politik P.N.I. (Partai Nasional Indonesia), ada lagi harian atau majalah yang membela kepentingannya P.S.I.I. (Partai Sarekat Islam Indonesia), sama halnya dengan harian “*Soeara Oemoem*” yang membela kepentingan gerakannya Dr. R. Soetomo.”¹²¹

Harian *Soeara Oemoem* terbit setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur lainnya. *Soeara Oemoem* diterbitkan sebanyak 2½ lembar setiap hari atau terdiri dari 10 halaman. Pada edisi akhir pekan bisa mencapai 3 sampai 5 lembar. Penambahan halaman tersebut berdasarkan jumlah iklan yang masuk ke dalam surat kabar tersebut.¹²² Menurut Tjindarboemi, *Soeara Oemoem* termasuk ke dalam kelompok surat kabar yang cukup berpengaruh di Surabaya.¹²³ Pembacanya mencakup para priyayi yang menjadi pegawai negeri, kaum terpelajar, dan orang-orang Belanda yang ingin mengetahui kondisi orang-orang bumiputra terutama dalam hal pergerakan.¹²⁴ Khusus bagi golongan priyayi yang menjadi pegawai negeri, *Soeara Oemoem*

¹²⁰ Pengunduran diri tersebut disebabkan oleh campur tangan Soetomo dalam redaksi *Soeara Oemoem* terkait dengan pemotongan sebuah artikel mengenai PBI. Lihat: R.T. Tjindarboemi, *op.cit.*, hal. 149.

¹²¹ *ibid.*, hal. 140.

¹²² *ibid.*, hal. 154.

¹²³ Tjindarboemi menganggap *Soeara Oemoem* termasuk ke dalam surat kabar yang berpengaruh di Surabaya selain *Soerabajaasch Handelsblad*, *De Indische Courant*, *De Nieuwe Soerabaja Courant*, *Pewarta Soerabaja*, dan *Sin Tit Po*. Lihat: *ibid.*, hal. 146.

¹²⁴ I.N. Soebagijo, *op.cit.*, hal. 73.

mempunyai daya tarik tersendiri karena secara rutin memuat berita mutasi pegawai. Berita-berita ini didapatkan *Soeara Oemoem* dari wakil-wakilnya yang tersebar di kantor-kantor pemerintah kolonial.

Soeara Oemoem, dalam pemberitaannya, selalu memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kondisi masyarakat bumiputra. Kritik juga sering dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat bumiputra. Pembahasan mengenai isu-isu tersebut tidak hanya terbatas pada upaya menampilkan berita-berita peristiwa yang sifatnya informatif, tetapi juga dikaji dalam pembahasan yang lebih terperinci melalui kolom-kolom khusus, seperti dalam kolom yang berjudul “Teropong”.

Soeara Oemoem tetap menampilkan sikapnya yang moderat kepada pemerintah kolonial. Kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap baik, tidak jarang mendapat penghargaan dari *Soeara Oemoem*. Namun demikian, pemberitaan mengenai pemogokan awak kapal perang “De Zeven Provinciën” yang dilakukan oleh *Soeara Oemoem* pada bulan Februari 1933 mengakibatkan *Soeara Oemoem* terkena pembredelan berupa hukuman larangan terbit selama delapan hari. Tjindarboemi sebagai pimpinan redaksi yang banyak menulis tentang peristiwa tersebut ditangkap oleh pemerintah kolonial dan ditahan di penjara Kalisosok-Surabaya selama satu tahun. Pengadilan kemudian memutuskan Tjindarboemi akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan. Tjindarboemi lalu dipindahkan ke penjara Sukamiskin-Bandung.

Selama Tjindarboemi ditahan, *Soeara Oemoem* tetap menampilkan namanya sebagai pimpinan redaksi dengan keterangan “dalam tahanan preventif” dan kemudian diubah menjadi “dalam penjara”. Setelah penahanan Tjindarboemi, *Soeara Oemoem* kemudian ditangani secara langsung oleh pengurus besar PBI. Raden Roeslan Wongsokoesoemo, yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua II pengurus besar PBI, ditunjuk sebagai pemimpin redaksi. Tjindarboemi dibebaskan pada bulan Agustus 1934 setelah mendapatkan potongan hukuman selama dua bulan.¹²⁵

Pada pertengahan dasawarsa tahun 1930-an, *Soeara Oemoem* menjadi salah satu surat kabar yang dinaungi oleh Parindra, sebuah partai gabungan antara PBI dan Budi Utomo. Masa terbitnya bertahan sampai tahun 1942. Hilangnya *Soeara Oemoem* dari peredaran belum diketahui sebabnya. Kemungkinan yang terjadi adalah *Soeara Oemoem* berganti nama atau bergabung dengan surat kabar lain yang bertahan pada masa pendudukan Jepang.

B.2. *Persatoean Indonesia*

Persatoean Indonesia diterbitkan pertama kali pada tanggal 15 Juli 1928. Surat kabar ini diterbitkan sebanyak dua kali sebulan. Penerbitan surat kabar ini merupakan pelaksanaan dari salah satu keputusan dalam kongres PNI yang pertama di Surabaya pada tanggal 28—30 Mei 1928.¹²⁶ Dasar pendirian tersebut menunjukkan surat kabar *Persatoean Indonesia* ini merupakan surat kabar yang berada di bawah

¹²⁵ I.N. Soebagijo, *op.cit.*, hal. 75

¹²⁶ *Persatoean Indonesia*, 15 Juli 1928 edisi no. 1

naungan PNI. Hal itu juga terlihat dari tulisan yang tertera dalam halaman pertama surat kabar yang mencantumkan *Hoofd Bestuur* PNI sebagai penerbit. Namun demikian penerbitan surat kabar *Persatoean Indonesia* ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti yang dituliskan redaksi dalam artikel pengantar edisi pertama: “*Soerat chabar ini teroetama akan tersedia oentoek menjokong pergerakan nasional Indonesia di dalam oemoemnja. Djadi boekanlah semata-mata bagi kepentingan P.N.I. sadja*”.¹²⁷ Tujuan ini juga dijadikan slogan surat kabar yang diletakkan di dalam halaman pertama surat kabar, yang berbunyi: “*Soerat chabar setengah boelanan tersedia oentoek menjokong pergerakan nasional Indonesia*”. Namun sejak edisi bulan November 1928, slogan ini dihilangkan di muka surat kabar tanpa adanya keterangan.

Nama *Persatoean Indonesia* sendiri diambil berdasarkan kondisi pergerakan nasional pada waktu itu yang sedang ramai membicarakan masalah persatuan, seperti yang ditulis dalam kata pendahuluan surat kabar tersebut:

“Soerat chabar ini diberi nama “Persatoean Indonesia”. Apakah masih perloe kita terangkan akan maksoed dan ertinja nama itoe?

Oedara politiek Indonesia penoeh berisi dengan fikiran dan harapan Persatoean. Tiap-tiap partai politiek kebangsaan memadjoekan “persatoean” didalam azas dan daftar oesahanja. Itoelah kemaoean Zaman.

Beberapa tahoen dahoeloe beloemlah kita dapat memikirkan satoe Indonesia Raja, sedangkan sekarang bolehlah dikatakan, jang juga fikiran telah moelai masoek didalam hati sanoebari Ra’jat Indonesia.”¹²⁸

Alamat redaksi dan administrasi *Persatoean Indonesia* pada mulanya terletak di Pintoe Ketjil No. 46 Batavia dan setahun kemudian, tepatnya pada bulan Juni 1929,

¹²⁷ *ibid*

¹²⁸ *ibid*

kantor *Persatoean Indonesia* berpindah tempat ke Gg. Kenari-Weltevreden. Kantor tersebut kemudian digunakan sampai masa berakhirnya penerbitan *Persatoean Indonesia*. Percetakan yang digunakan untuk mencetak surat kabar ini pada awalnya adalah percetakan yang dimiliki oleh surat kabar *Keng Po* yang bernama Tyu. Drukkerij “Keng Po” Batavia. *Persatoean Indonesia* kemudian selama masa terbitnya beberapa kali berganti percetakan. Pergantian itu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan *Persatoean Indonesia*. Mengenai tarif surat kabar, *Persatoean Indonesia* pada awal penerbitannya memasang tarif satu nomornya sebesar 15 sen, sedangkan f. 3,- untuk langganan selama 1 tahun, f. 1,50 untuk langganan setengah tahun, dan f. 4,50 setahun untuk pelanggan yang berada di luar Indonesia. Sementara itu untuk tarif iklan dikenakan f. 0,30 per baris dengan batas minimal f.3,- satu kali dimuat. Tarif tersebut sampai akhir masa penerbitannya selalu bertambah secara bertahap.¹²⁹ Mengenai banyaknya oplah *Persatoean Indonesia* dapat diketahui dari sebuah tulisan redaksi yang membahas kiprah *Persatoean Indonesia* selama tiga tahun penerbitannya. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa *Persatoean Indonesia* selama tiga tahun penerbitannya sudah mempunyai pembaca sebanyak 2950 orang.¹³⁰

Persatoean Indonesia awalnya terdiri dari dua lembar dengan masing-masing lembar sebanyak empat halaman. Mengenai isi tiap halamannya, *Persatoean Indonesia* tidak memberikan penamaan kolom atau rubrik berita yang tetap. Judul berita dan artikel yang dimuat berdasarkan peristiwa dan isu dalam dunia pergerakan

¹²⁹ Alasan kenaikan tarif tersebut adalah biaya operasional yang meningkat setiap tahun.

¹³⁰ *Persatoean Indonesia*, 1 Januari 1930 no. 36.

nasional yang sedang marak pada saat itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia internasional juga dimuat secara rutin oleh *Persatoean Indonesia*. Pemberitaan mengenai aktivitas partai selalu dicantumkan dalam setiap penerbitan *Persatoean Indonesia*.

Pemimpin sidang redaksi *Persatoean Indonesia* pada awal penerbitannya adalah Soekarno dan Soenarjo, sedangkan urusan administrasi diserahkan kepada Sartono.¹³¹ Anggota redaksi lainnya tidak diketahui karena tidak pernah disebutkan di dalam surat kabar. Pimpinan sidang redaksi terpaksa mengalami perubahan pada edisi bulan Maret 1930.¹³² Sebuah komisi redaksi dibentuk untuk menggantikan Soekarno yang dipenjara di Sukamiskin. Selain redaksi, pemegang urusan administrasi surat kabar juga mengalami perubahan. Sartono yang sebelumnya menjabat sebagai pemegang urusan administrasi, harus mencurahkan perhatian penuh kepada urusan partai sehingga posisinya diganti oleh Soedjadi. Walaupun sepanjang tahun 1930 gerakan PNI dibatasi dan nasib para pemimpinnya yang ditahan belum dipastikan, *Persatoean Indonesia* berhasil menambah frekuensi terbitnya dari sebelumnya hanya dua kali sebulan menjadi tiga kali sebulan.¹³³

Hasil persidangan para tokoh-tokoh PNI yang ditetapkan pada akhir Desember, mendorong pengurus besar PNI sementara mengadakan konferensi pada tanggal 14 Februari 1931. Salah satu keputusan konferensi tersebut adalah

¹³¹ Sartono kemudian dibantu oleh agen-agen administrasi yang juga merupakan anggota PNI di tiga kota besar yaitu Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung yang masing-masing dipimpin oleh Anwari, Sujudi, dan Samsi. Lihat: *Persatoean Indonesia*, 1 September 1928 edisi nomor 4.

¹³² *Persatoean Indonesia*, 10 Maret 1930 edisi no. 43.

¹³³ *Persatoean Indonesia*, 1 Januari 1930 edisi no. 36.

menghadiahkan *Persatoean Indonesia* kepada istri Soekarno, Nyonya Inggit. Keputusan tersebut oleh Nyonya Inggit dinyatakan sebagai tanda penghargaan PNI terhadap jasa-jasa Soekarno yang sedang menjalani hukuman penjara, seperti yang dituliskan oleh Nyonya Inggit dalam sebuah sambutan di *Persatoean Indonesia* edisi bulan Maret 1931: “ *Kepoatoesan congres loear biasa dari Partai Nasional Indonesia, jang terdjadi di kota Mataram, pada tanggal 14 Februari 1931 oleh jang berwadjib telah disampaikan kepada saja. Sk. “Persatoean Indonesia” dihadiahkan kepada saja sebagai tanda ketjintaan Partai kita terhadap kepada soeamiku jang sekarang sedang berada dalam pendjara.*”¹³⁴

Nyonya Inggit kemudian menunjuk sebuah komisi redaksi untuk memimpin *Persatoean Indonesia* selama Soekarno berada di penjara. Untuk urusan administrasi, oleh Nyonya Inggit diberikan kembali kepada Sartono. Pada edisi 10 Juni 1931, Nyonya Inggit menjadikan *Persatoean Indonesia* sebagai surat kabar mingguan yang terbit setiap minggunya pada hari Rabu.¹³⁵ Nyonya Inggit juga menunjuk Njonoprawoto sebagai pimpinan redaksi sekaligus pemegang urusan administrasi. Pada bulan ini pula *Persatoean Indonesia* diserahkan kepada Partindo sehingga *Persatoean Indonesia* secara resmi kembali di bawah naungan sebuah organisasi politik.¹³⁶ Pergantian kepemilikan ini sedikit banyak mengubah wajah *Persatoean Indonesia*. Kolom untuk berita partai atau laporan kegiatan partai ditambahkan cukup

¹³⁴ *Persatoean Indonesia*, 30 Maret 1930 edisi no. 81.

¹³⁵ *Persatoean Indonesia*, 10 Juni 1931 edisi no. 88.

¹³⁶ *Persatoean Indonesia*, 24 Juni 1930 no. 90.

banyak dibandingkan sebelumnya. Sepanjang akhir tahun 1931, *Persatoean Indonesia* banyak memuat perdebatan yang terjadi antara kelompok Partindo dengan kelompok “Golongan Merdeka”.

Perkembangan *Persatoean Indonesia* pada tahun 1932 dimulai dengan dikurangnya frekuensi terbit menjadi sebanyak tiga kali sebulan. Hal ini terkait dengan aktifitas redaksinya juga harus fokus kepada pengembangan Partindo. Selain itu biaya operasional juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengurangi frekuensi terbit. Sepanjang tahun 1932, *Persatoean Indonesia* banyak memuat perdebatan antara Partindo dengan organisasi PNI-Baru yang merupakan wadah baru bagi “Golongan Merdeka”. Artikel-artikel yang dimuat dalam *Persatoean Indonesia* seringkali mendapat sanggahan dari “Daulat Ra’jat” yang merupakan media aspirasi kelompok “Golongan Merdeka” dan PNI-Baru. Walaupun perhatian *Persatoean Indonesia* seringkali terpaku pada persaingan dengan PNI-Baru, peristiwa-peristiwa pergerakan yang terjadi pada tahun 1932 tetap mendapat tempat tersendiri. Ordonansi Sekolah “Liar” tahun 1932, sebagai contoh, dibahas secara mendetail oleh *Persatoean Indonesia* pada satu edisi bulan Oktober 1932. Pada akhir tahun 1932, posisi Njonoprawoto sebagai pimpinan redaksi digantikan oleh G.R. Pantouw yang sebelumnya menjadi pengurus bagian pers Partindo.

Perkembangan *Persatoean Indonesia* pada tahun 1933 mengalami hambatan yang terkait dengan sikap pemerintah kolonial terhadap Partindo. Pergantian struktur kepengurusan dalam *Persatoean Indonesia* kembali terjadi. Pada pertengahan tahun 1933, *Persatoean Indonesia* dipimpin oleh pemimpin sidang redaksi yang berada di

dalam penjara. Pemimpin redaksi itu adalah Joesoef Jahja yang ditangkap akibat tuntutan perkara *persdelict* ganda dari pemerintah kolonial akibat artikelnya yang bernada lantang dalam surat kabar *Gledek* dan artikel yang menanggapi penangkapan Soekarno dalam *Persatoean Indonesia* edisi bulan Agustus 1933.¹³⁷ Edisi bulan Agustus 1933 juga membuat beberapa pengurus besar Partindo seperti Sartono dan Soewirjo serta wakil pemimpin sidang redaksi Jahja Nasoetion dipanggil menghadap asisten residen pada tanggal 30 Agustus 1933. *Persatoean Indonesia* kemudian dimasukkan ke dalam daftar hitam (*zwartelijst*) oleh pemerintah kolonial, sehingga besar kemungkinan sewaktu-waktu *Persatoean Indonesia* dapat terkena *persbreidel ordonnantie*.¹³⁸ Ancaman pemerintah kolonial ini berpengaruh kepada jadwal penerbitan *Persatoean Indonesia* yang sering terlambat bahkan terpaksa digabungkan dengan jadwal terbit berikutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa percetakan yang biasa mencetak *Persatoean Indonesia* tidak berani menerima pesanan akibat ancaman polisi yang menutup percetakan tersebut apabila *Persatoean Indonesia* terkena *persdelict* kembali.¹³⁹

Persatoean Indonesia pada akhirnya terkena sanksi pembredelan selama 30 hari, yakni terhitung mulai tanggal 25 Oktober 1933 sampai dengan 25 November

¹³⁷ *Persatoean Indonesia*, edisi nomor 177 tanggal 10 Agustus 1933 tahun ke-VI; berita penangkapan Joesoef Jahja ada di dalam *Persatoean Indonesia* edisi nomor 178 tanggal 20 Agustus 1933; Joesoef Jahja sendiri adalah lulusan perguruan tinggi di Belanda dan pernah mengenyam pendidikan jurnalistik di Universiteit Koln. Setelah kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1931, ia menjadi seorang guru di Perguruan Rakyat Gg. Kenari dan ikut berperan mendirikan Partindo. Lihat: *Persatoean Indonesia*, edisi nomor 180—181 tanggal 10—20 September 1933.

¹³⁸ *Persatoean Indonesia*, edisi nomor 179 tanggal 30 Agustus 1933.

¹³⁹ *Persatoean Indonesia*, edisi nomor 180—181 tanggal 10—20 September 1933.

1933.¹⁴⁰ Pembredelan tersebut merupakan lanjutan dari perkara *Persatoean Indonesia* yang dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pembredelan ini kemudian berpengaruh kepada pembayaran para pelanggan sehingga pada bulan Desember 1933, *Persatoean Indonesia* hanya mampu terbit satu kali. Edisi *Persatoean Indonesia* pada bulan Desember ini ternyata merupakan edisi terakhir. Pada awal tahun 1934, *Persatoean Indonesia* tidak muncul kembali tanpa adanya pemberitahuan.

B.3. *Daulat Ra'jat*

Daulat Ra'jat diterbitkan pertama kali pada tanggal 20 September 1931 oleh kelompok “Golongan Merdeka”.¹⁴¹ Pada awal penerbitannya, pengelolaan redaksi *Daulat Ra'jat* ini dilakukan oleh sebuah komisi redaksi (*commissie van redactie*) yang dipimpin oleh Soekarta yang beralamat di Gg. Lontar IX/49 Batavia-Centrum. Sedangkan mengenai urusan administrasi, dilakukan oleh S. Boedihardja yang juga beralamat di tempat yang sama. Redaksi surat kabar ini pada waktu itu tersebar di berbagai wilayah Hindia Belanda dan juga di luar Hindia Belanda. Orang-orang yang menjadi redaksi dalam surat kabar ini adalah Wijono Soeriokoesoemo (Malang), Samidin (Palembang), Siswarahardja (Soerabaja), Mohammad Hatta (Rotterdam), S. Sjahrir (Amsterdam), dan Soeparman (Leiden).¹⁴² Pengenal susunan redaksi dari *Daulat Ra'jat* ini hanya ditampilkan pada awal penerbitannya saja, besar

¹⁴⁰ *Persatoean Indonesia*, edisi nomor 185 tanggal 30 November 1933.

¹⁴¹ Mengenai kelompok “Golongan Merdeka” sudah dijelaskan di dalam bab 2.

¹⁴² *Daulat Ra'jat*, 30 September 1931 edisi no. 2.

kemungkinan di tahun-tahun berikutnya susunan redaksi tersebut mengalami perubahan.

Daulat Ra'jat diterbitkan setiap 10 hari sekali atau tiga kali terbit setiap bulannya. Tarif yang dikenakan untuk setiap nomor *Daulat Ra'jat* adalah sebesar 15 sen. Untuk tarif langganan selama satu tahun sebesar f. 6,- dan langganan selama tiga bulan sebesar f. 1,5 dengan dibayar dimuka. Dan sebesar f. 2,- selama tiga bulan untuk pelanggan yang berada di luar negeri. *Daulat Ra'jat* juga menerima jasa iklan dengan tarif 20 sen tiap satu barisnya. Tarif yang dikenakan ini sepanjang masa penerbitan *Daulat Ra'jat* tidak pernah berubah.

Penerbitan *Daulat Ra'jat* pada awalnya dilakukan dalam rangka membentuk sebuah media penampung aspirasi “Golongan Merdeka” yang tersebar di berbagai kota besar di Pulau Jawa. Tujuan lain dari penerbitan ini adalah menghimpun kelompok “Golongan Merdeka” serta orang-orang bumiputra mantan simpatisan PNI yang telah dibubarkan dan mengarahkannya kepada suatu pembentuk gerakan politik radikal baru yang bersendi kepada pendidikan kader. Penerbitan surat kabar ini diprakarsai oleh Hatta ini, dibantu oleh Soedjadi yang merupakan mantan anggota PNI yang tidak setuju dengan keputusan pembubaran dan juga sudah lama berperan sebagai perwakilan PI di Hindia Belanda. Penamaan *Daulat Ra'jat* bermula dari

usulan Hatta yang masih berada di negeri Belanda.¹⁴³ Pengertian *Daulat Ra'jat* dijelaskan dalam buku catatan harian Hatta yang diterbitkan berjudul "Memoir".

"Daulat Ra'jat" akan mempertahankan azas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala susunan: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaulan sosial. Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (*souvereiniteit*). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan tenggelam. Hidup atau mati rakyat Indonesia bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya."¹⁴⁴

Daulat Ra'jat merupakan surat kabar yang berdiri di bawah naungan organisasi Pendidikan Nasional Indonesia atau dikenal sebagai PNI-Baru. Organisasi tersebut dibentuk oleh Hatta dan kelompok "Golongan Merdeka" yang juga menerbitkan *Daulat Ra'jat*. Meskipun demikian asal penerbit yang selalu dicantumkan oleh *Daulat Ra'jat* adalah "Kaum Golongan Merdeka". Namun *Daulat Ra'jat* tetap menjadi media bagi PNI-Baru untuk menyebarkan prinsip pergerakannya. Selain itu, *Daulat Ra'jat* sendiri merupakan bahan bacaan yang bersifat wajib bagi setiap calon kader PNI-Baru.

Kedatangan dua orang tokoh pergerakan nasional penyokong PNI-Baru yang populer dari negeri Belanda, yakni Hatta dan Sjahrir, mengubah kepemimpinan dalam dewan redaksi *Daulat Ra'jat*. Sjahrir yang tiba lebih dahulu di Hindia Belanda, pada tanggal 10 Januari 1932 mengambil alih pimpinan dewan redaksi *Daulat Ra'jat*.

¹⁴³ Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta, 2002), hal. 244; kondisi koleksi edisi perdana *Daulat Ra'jat* rusak sehingga sebagian teksnya tidak dapat dibaca. Teks tersebut dimasukkan oleh Hatta ke dalam otobiografinya yang berjudul *Memoir*.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Namun kepemimpinan Sjahrir tidak berlangsung lama karena pada pertengahan bulan Juni 1932, Sjahrir terpilih menjadi ketua pengurus besar PNI-Baru. Komisi redaksi *Daulat Ra'jat* kemudian mengharapkan Hatta yang akan pulang ke Hindia Belanda pada bulan Agustus 1932, menjadi pemimpin redaksi selanjutnya. Hatta kemudian mengambil alih pimpinan redaksi *Daulat Ra'jat* pada bulan September 1932. Pada kata sambutannya sebagai pemimpin redaksi *Daulat Ra'jat* yang baru, Hatta menyebutkan arah dan bentuk surat kabar yang ia tangani itu. *Daulat Ra'jat* akan memperjuangkan prinsip Kedaulatan Ra'jat yang juga prinsip PNI-Baru. Selain itu, bentuk *Daulat Ra'jat* yang bersifat informatif serta teoritis dalam pemaparannya akan dibuat lebih mudah ulasannya dalam rangka memperluas penyebaran surat kabar ini. *Daulat Ra'jat* sebagai surat kabar yang memuat topik-topik bahasan yang teoritis membuat isi surat kabar ini menjadi sulit dipahami oleh rakyat bumiputra secara umum. Hatta mengupayakan *Daulat Ra'jat* agar dapat dibaca oleh masyarakat bumiputra seutuhnya.

“ Adanja karangan-karangan jang agak soekar sedikit didalam “Daulat Ra'jat” tidak boleh djadi halangan bagi Kaoem Daulat Ra'jat akan membentangkan boeah fikiran jang moedah di halaman madjallah kita. Daulat Ra'jat boeat kader atau pemimpin di bawah sadja, melainkan djoega boeat ra'jat djelata. Ia haroes mendjadi trompetnja Kaoem Marhaen. Sebab itoe selain dari pada perkara azas madjallah kita haroes memoeat djoega keloeh kesah ra'jat, soepaja nasib ra'jat bernjala lebih terang bagi pergerakan kita.”¹⁴⁵

Perkembangan *Daulat Ra'jat* pada tahun pertamanya disebutkan dalam sebuah tulisan redaksi yang memperingati usia satu tahun *Daulat Ra'jat*. Selama satu tahun penerbitan, *Daulat Ra'jat* menggambarkan dirinya sudah mencapai beberapa

¹⁴⁵ *Daulat Ra'jat*, 10 September 1932 edisi no. 36.

kemajuan berupa adanya perhatian dari kalangan pergerakan nasional seumumnya terhadap surat kabar ini. Namun tulisan tersebut tidak menyebutkan secara mendetail sudah sejauh mana penyebaran dan pengaruh *Daulat Ra'jat*.

“ Tidak dapat disangkal tahoen jang pertama ini bagi kaoem Daulat Ra'jat seoemoemnja dan bagi madjallah kita ini pada choesoesnja adalah soedah membawa soeatoe kemenangan, terboekti dari besarnja perhatian dan pengaroeh di dalam dan di loear kalangan kita.

Oleh beberapa pihak sekarang diakoeinja, bahwa madjallah kita ini adalah memenoehi keboetoehan pergerakan kemerdekaan kita.”¹⁴⁶

Kemajuan *Daulat Ra'jat* kembali disebutkan oleh dalam tulisan menyambut tahun baru 1933. Tulisan tersebut menyebutkan:

“ Dari moelanja sifat “Daulat Ra'jat” memberi penerangan kepada pergerakan kita, memboeka mata ra'jat soepaja tahoe akan haknja serta kewadjibannja kepada masjarakat sendiri. Dengan memadjoekan Kedaulatan Ra'jat madjallah kita menoenjoekkan djalan baroe kepada ra'jat oentoeok mengetahoei diri sendiri.

Sifat inilah jang mendjadi sebab, maka madjallah kita dibatja orang disegenap tempat, sampai ke desa-desa jang paling ketjil. Sekalipoen ada krisis jang menimpa ra'jat jang memangnja soedah djoega melarat, perhatian ra'jat kepada “Daulat Ra'jat” tidak bertambah koerang, melainkan senantiasa bertambah besar. Ini soeatoe tanda bagi kita, bahwa “Daulat Ra'jat” soedah mendjadi kawan ra'jat sehari-hari dalam perdjoeangan. Dalam praktik terang dan njata bahwa teori dan tjita-tjita Kedaulatan Ra'jat moedah dan lekas termakan oleh ra'jat djelata, maepoen jang di kota maepoen jang di desa.”¹⁴⁷

Menjelang akhir tahun 1933 dan awal tahun 1934, pergerakan nonkooperasi mengalami pembatasan yang ketat dari pemerintah kolonial, termasuk PNI-Baru. Larangan berkumpul dan mengadakan rapat umum membuat PNI-Baru menjadi sulit berkembang. Selain itu, pemerintah kolonial juga menangkapi tokoh-tokoh pemimpin

¹⁴⁶ *Daulat Ra'jat*, 20 September 1932 edisi no. 37.

¹⁴⁷ *Daulat Ra'jat*, 10 Januari 1933 edisi no. 48.

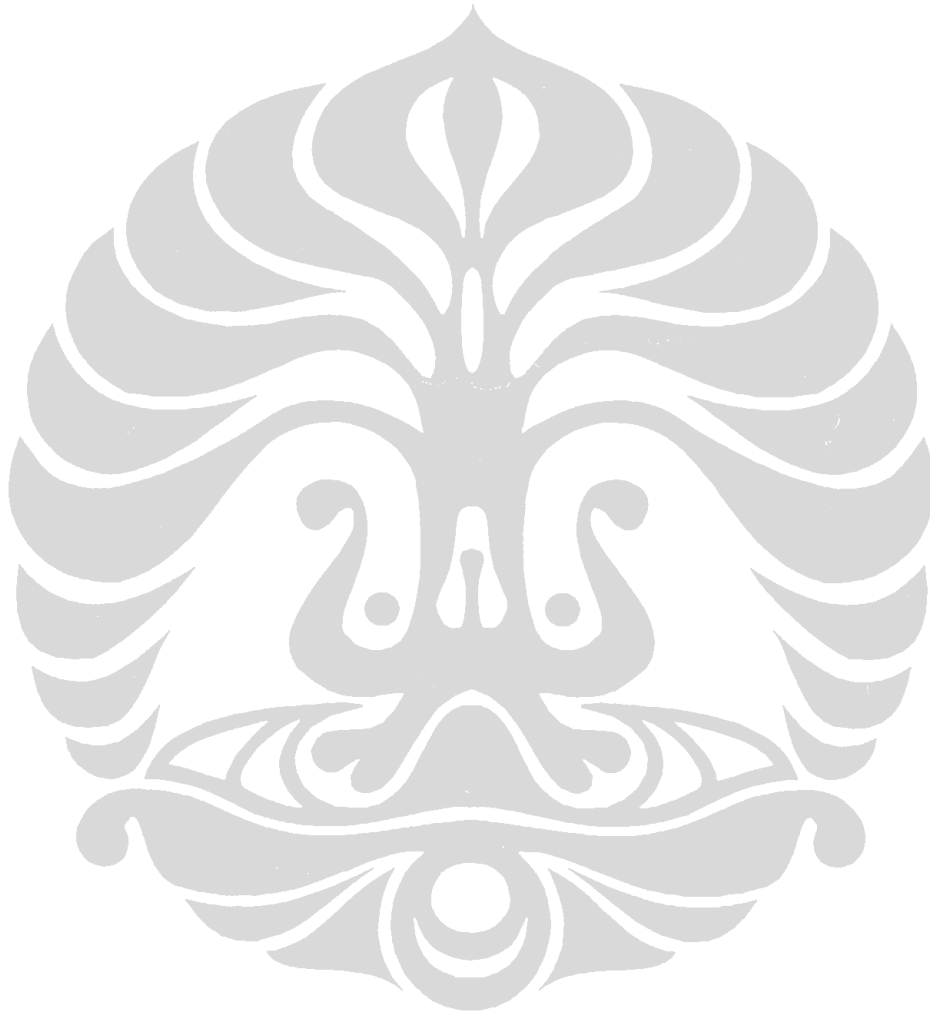
terkemuka PNI-Baru seperti Hatta dan Sjahrir serta beberapa orang lainnya. Namun demikian bagi *Daulat Ra'jat* sebagai salah satu media yang menyebarkan asas PNI-Baru, keadaan yang sulit ini masih bisa diatasi sehingga penerbitannya bisa bertahan. Hatta yang ditangkap pada tanggal 25 Februari 1984, menyebutkan bahwa letak perbedaan mendasar antara PNI-Baru dengan Partindo adalah ketahanannya dalam menghadapi tekanan.¹⁴⁸ Kelangsungan hidup partai tidak tergantung dari tokoh dan pengurus besarnya. Berbeda dengan Partindo dan *Persatoean Indonesia* yang langsung hilang ketika tokoh-tokoh intinya ditahan, PNI-Baru dan *Daulat Ra'jat* dapat bertahan dengan tokoh-tokoh penerusnya yang terus bermunculan. Hal ini disebabkan oleh pergerakan PNI-Baru yang didasarkan pada pendidikan dan kaderisasi yang diarahkan kepada ketahanan sikap.

Setelah penangkapan para pengurus besarnya, PNI-Baru diteruskan oleh kepengurusan baru yang juga berasal “Golongan Merdeka”. *Daulat Ra'jat* sebagai media yang menyampaikan aspirasi PNI-Baru juga masih dapat bertahan sampai dengan akhir tahun 1934. Sepanjang itu *Daulat Ra'jat* dikemudikan oleh seorang anggota PNI Baru yang bernama T.A. Moerad dan kemudian diteruskan oleh Haroen-Moein.¹⁴⁹ Hatta yang pada waktu itu berada di dalam penjara, masih sempat membaca *Daulat Ra'jat* yang dikumpulkan oleh salah seorang keluarganya. Edisi terakhir *Daulat Ra'jat* yang diterbitkan adalah edisi bulan September 1934. Hilangnya *Daulat Ra'jat* dari peredaran tidak diketahui sebabnya. T.A. Moerad yang

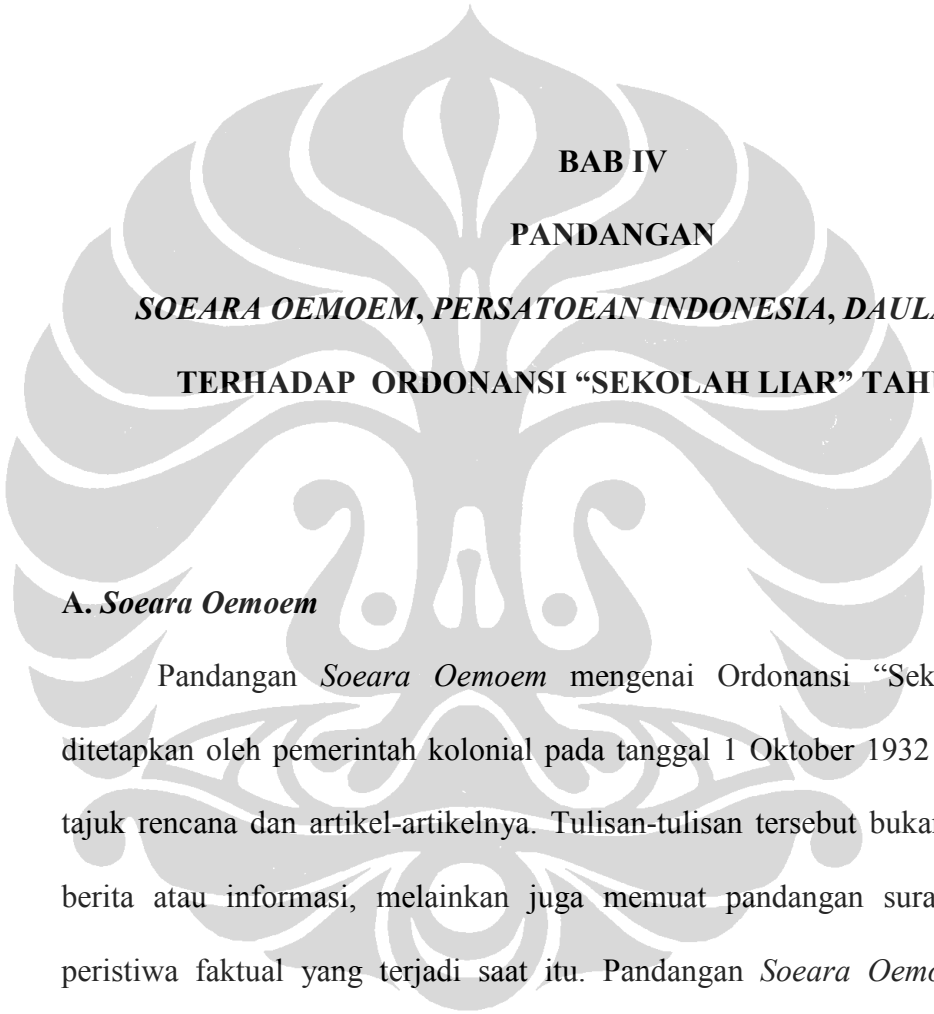
¹⁴⁸ Mohammad Hatta, *op.cit.*, hal. 345—346

¹⁴⁹ *Daulat Ra'jat*, 10 Agustus 1934 edisi no. 104.

masih mengelola *Daulat Ra'jat* pada akhir tahun 1934, ditangkap dan dipenjara di Penjara Glodok.¹⁵⁰



¹⁵⁰ Malvis Rose, *op.cit*, hal. 127



BAB IV
PANDANGAN
SOEARA OEMOEM, PERSATOEAN INDONESIA, DAULAT RA'JAT
TERHADAP ORDONANSI “SEKOLAH LIAR” TAHUN 1932

A. Soeara Oemoem

Pandangan *Soeara Oemoem* mengenai Ordonansi “Sekolah Liar” yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial pada tanggal 1 Oktober 1932 dapat dilihat dari tajuk rencana dan artikel-artikelnya. Tulisan-tulisan tersebut bukan saja merupakan berita atau informasi, melainkan juga memuat pandangan surat kabar terhadap peristiwa faktual yang terjadi saat itu. Pandangan *Soeara Oemoem* terlihat pada halaman pertama yang biasanya berperan ganda sebagai *headline* sekaligus tajuk rencana. Selain itu, opini juga terlihat pada sebuah kolom kajian yang secara rutin dimuat yang dinamai “Teropong”. Tulisan yang terletak pada halaman pertama biasanya ditulis oleh Tjindarboemi sebagai pimpinan redaksi. Sementara itu kolom “Teropong” secara rutin ditulis oleh seorang redaksi dengan nama pena Linea

Recta.¹⁵¹ Pandangan *Soeara Oemoem* juga dapat dilihat dari sebuah kolom kecil yang berjudul “Di Podjok”, walaupun kolom ini hanya dimuat sesekali oleh redaksi. Selain itu, terdapat pula tulisan-tulisan dalam bentuk artikel bebas dalam *Soeara Oemoem* yang membahas Ordonansi “Sekolah Liar”. Artikel tersebut ditulis oleh kontributor *Soeara Oemoem* yang secara rutin mengirimkan tulisannya. *Soeara Oemoem* juga beberapa kali memuat pandangan pembaca, termasuk dalam menanggapi Ordonansi “Sekolah Liar”. Surat pembaca tersebut biasanya diberi tanggapan oleh redaksi *Soeara Oemoem*.

Telegram Ki Hadjar Dewantara terhadap Gubernur Jenderal De Jonge pada tanggal 1 Oktober 1932 menjadi titik permulaan aksi protes pergerakan nasional terhadap *Toezicht Particulier Onderwijs*. Salinan dari telegram tersebut dimuat dalam banyak surat kabar, termasuk *Soeara Oemoem*. Pada tanggal itu pula, *Soeara Oemoem* memuat telegram tersebut beserta isi *Toezicht Particulier Onderwijs* atau yang disebut oleh kalangan pergerakan nasional sebagai Ordonansi “Sekolah Liar”. Seruan Ki Hadjar Dewantara kemudian juga dimuat dalam beberapa edisi *Soeara Oemoem* setelah tanggal 1 Oktober 1932.¹⁵²

Tanggapan *Soeara Oemoem* terhadap ordonansi ini baru muncul pada edisi tanggal 6 Oktober 1932. Tanggapan tersebut muncul dalam tulisan yang berjudul

¹⁵¹ “Linea Recta” mempunyai arti “langsung menuju sasaran”. Hal ini sesuai dengan gaya tulisan Linea Recta yang lugas dalam mengkaji suatu masalah di kolom “Teropong”. Nama asli Linea Recta adalah S.M. Latief yang dulunya juga ikut menjadi rekan Tjindarboemi pada saat masih menjadi *hoofdredacteur* di *Soeloeh Rakjat Indonesia*. Lihat: R.T. Tjindarboemi, *op.cit.*, hal. 145.

¹⁵² Seruan tersebut dimuat dalam *Soeara Oemoem* edisi tanggal 3—4 Oktober 1932.

“Tetak Sekali Doea”.¹⁵³ Tulisan tersebut mengulas mengenai kata-kata yang tercantum dalam ordonansi tersebut yang bersifat terbuka sehingga perguruan nasional seperti Taman Siswa dapat pula terkena ordonansi tersebut. Medewerker mencoba meyakinkan pembaca bahwa pendukung pergerakan nasional harus melakukan protes agar ordonansi tersebut dibatalkan. Mengenai ordonansi yang baru saja diberlakukan ini, Medewerker menulis:

“ Dari keterangan dalam Volksraad sadja jaitoe bahasa jang terkena oleh ordonnansi ini jalah sekolah-sekolah jang boekan kepoenjaan goebnemen atau jang tiada bersubsidie, njatalah bahasa dalam praktik Taman Siswa akan kena djoega. Ordonnansi baroe ini menimboelkan ketentoean dalam hati kita, dia diadakan oentoe menjerang onderwijs nasional sekaligoes dengan wilde scholen yang sebenarnja.”¹⁵⁴

Selain tulisan Medewerker ini yang bersifat opini, *Soeara Oemoem* juga memuat berita peristiwa yang berhubungan dengan protes terhadap ordonansi ini, seperti maklumat dan rapat-rapat dari berbagai perkumpulan. Berita-berita ini secara rutin dimuat dalam *Soeara Oemoem* selama aksi protes terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” berlangsung, yaitu sampai bulan Februari 1933.

Pertemuan antara Kiewiet de Jonge yang merupakan perwakilan pemerintah kolonial dan Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 19 dan 21 Oktober 1932 menarik perhatian Tjindarboemi sehingga dalam tajuk rencana *Soeara Oemoem* edisi tanggal 22 Oktober 1932, yang berjudul “Soeroet Ksjatria”, membahas mengenai pertemuan

¹⁵³ A-medewerker, “Tetak Sekali Doea”, *Soeara Oemoem*, 6 Oktober 1932 no. 5, latar belakang Medewerker tidak diketahui karena tidak adanya keterangan. Tulisan-tulisannya yang ditampilkan dalam *Soeara Oemoem* biasanya diletakkan secara bebas dalam arti tidak dimasukkan dalam kolom tertentu.

¹⁵⁴ *ibid.*

tersebut.¹⁵⁵ Tjindarboemi menyatakan bahwa protes berupa *lijdelijk verzet* yang dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara itu akan mendapatkan simpati dari seluruh kalangan rakyat Indonesia dan perjuangan nasional pada umumnya. Selain itu, Tjindarboemi juga mengingatkan pemerintah kolonial bahwa sekolah-sekolah partikelir tak bersubsidi yang didirikan sebenarnya meringankan beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan pendidikan ketika kondisi perekonomian Hindia Belanda sedang menurun akibat krisis ekonomi dunia. *Soeara Oemoem* dalam artikel ini juga menanggapi dengan baik adanya pertemuan Ki Hadjar Dewantara dengan Kiewiet de Jonge. Sikap tersebut mencerminkan bahwa *Soeara Oemoem* menginginkan penyelesaian dengan cara yang baik antara pihak pemerintah kolonial dan Ki Hadjar Dewantara, seperti yang dituliskan dalam tulisan tajuk rencana ini: “*Pada pemerintah masih ada kesempatan menarik ordonnansi ini dengan lakoe ksjatria. Moga-moga pertemoean Ir. Kiewiet de Jonge dengan Ki Adjar membawa hasil jang baik djoegalah kiranja.*”¹⁵⁶

Upaya mengingatkan pentingnya pendidikan partikelir dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan pendidikan yang tinggi, kembali disebutkan dalam tulisan-tulisan Tjindarboemi dan Medewerker berikutnya. Tjindarboemi dalam tajuk rencana yang berjudul “*De Morale Zijde*” menyatakan bahwa peraturan yang mempersulit pendidikan partikelir tumbuh di saat penerapan kebijakan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial merupakan tindakan yang tidak tepat karena

¹⁵⁵ *Soeara Oemoem*, 19 Oktober 1932 no. 21.

¹⁵⁶ *ibid.*

sekolah-sekolah partikelir justru mampu meringankan kewajiban pemerintah terhadap rakyat Indonesia.¹⁵⁷ Tjindarboemi juga menyatakan dukungan serta pujiannya terhadap sikap Ki Hadjar Dewantara dengan menyebutkan bahwa Ki Hadjar Dewantara membangkitkan mental pemberani rakyat Indonesia, seperti yang dituliskan dalam kutipan artikel berikut ini:

“ Kedjadian ini amat besar artinja, lebih dari arti seloesin openbare vergaderingen jang dilakoekan selama ini. Kedjadian itoe menoenjoekkan kemadjoean bathin bangsa kita, jang tiada begitoe pesat kelihatan sampai kini. Orang masoek boei selama ini seperti masoek koeboer. Keberanian tidak ada. Hati bangsa kita amat ketjil oentoek melakoekan “kehormatan” ini, sebab training beloem ada.

Djasa Ki Hadjar baroe ini besar sekali, sebab dia merobah mentaliteit bangsa kita. Bangsa kita jang penakoet selama ini dengan adanja sikap Ki Hadjar, moelai berani.”¹⁵⁸

Sementara itu, Medewerker mengutip keterangan dari Moh. Ansar yang menjadi pembicara dalam sebuah kongres PGHB di Cirebon yang diadakan dalam waktu yang berdekatan sebelum tulisan ini dibuat.¹⁵⁹ Keterangan tersebut merupakan perbandingan persentase jumlah murid Indonesia dengan murid dari bangsa lainnya di Hindia Belanda. Persentase murid Indonesia hanya sebesar 2,8 persen sedangkan murid-murid dari Belanda sebesar 16,6 persen. Oleh karena itu Medewerker menyatakan bahwa pemberlakuan Ordonansi “Sekolah Liar” adalah sesuatu yang sangat ganjil karena sekolah-sekolah partikelir yang didirikan oleh rakyat Indonesia

¹⁵⁷ *Soeara Oemoem*, 4 November 1932 no. 30

¹⁵⁸ *ibid.*

¹⁵⁹ A- medewerker, “Lagi sekali: sekolah ‘liar’ ”, *Soeara Oemoem*, 18 November 1932 no. 42; Medewerker menulis bahwa jumlah rakyat Hindia Belanda yang berjumlah kurang lebih 60.000.000 jiwa hanya disediakan kurang lebih 7000 sekolah rendah, beberapa puluh sekolah menengah dan beberapa sekolah tinggi.

sendiri justru membantu mengurangi jumlah rakyat Indonesia yang belum mengenyam pendidikan.

Konferensi PPPKI di Yogyakarta pada awal bulan November 1932 memutuskan untuk memberikan dukungan penuh kepada Ki Hadjar Dewantara dengan *lijdelijk verzet*-nya dan juga akan merencanakan *massa-actie* untuk menentang ordonansi tersebut. Tjindarboemi dalam tajuk rencana berjudul “P.P.P.K.I. dengan sekolah ‘Liar’” kemudian menanggapi keputusan PPPKI yang menyatakan dukungannya terhadap sikap Ki Hadjar Dewantara serta akan mengadakan *massa-actie* untuk menentang ordonansi tersebut.¹⁶⁰ Tulisan yang dimuat dalam tajuk rencana itu mengungkapkan bahwa keputusan untuk menentang Ordonansi “Sekolah Liar” dengan *massa-actie* adalah keputusan yang dirumuskan dengan sedikit terburu-buru mengingat perlawanan *lijdelijk verzet* yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara dianggap masih belum disepakati semua pihak. Tulisan tersebut juga mengulas sikap beberapa anggota PPPKI, seperti Pasundan, Budi Utomo, dan P.B.I. Pasundan disebutkan masih akan membicarakan masalah ordonansi ini lebih lanjut di dalam rapat internal perkumpulannya. Di pihak lain, Budi Utomo belum mengambil sikap yang lebih tegas dan baru mengeluarkan sebuah maklumat yang dibuat *voorzitter schoolcommissie*-nya yang berisi akibat-akibat pemberlakuan ordonansi tersebut terhadap sekolah-sekolah partikelir bumiputra. Sementara itu, P.B.I. menyatakan dukungannya terhadap sikap Ki Hadjar Dewantara walaupun dalam sebuah kursusnya yang diisi oleh petinggi P.B.I., yakni Koesmadi dan Soetomo, dinyatakan bahwa

¹⁶⁰ Soeara Oemoem, 23 November 1932 no. 46

ordonansi tersebut lambat laun akan memakan korban. Di akhir ulasan, Tjindarboemi memperlihatkan sikap yang cenderung pasrah dan mengharapkan sikap bijaksana pemerintah kolonial untuk bersedia menarik ordonansi tersebut.

“ Achirnja kepada perkoempoelan-perkoempoelan bangsa kita jang beloem lagi menetapkan aksinja terhadap “lijdelijk verzet”nja Ki Hadjar, teristimewa P.P.P.K.I. tidaklah lain djalan dari pada menoendjoekkan solidariteitnja kepada bangsa kita dan berdiri dibelakang Ki Hadjar dengan 100pCt. Di dalam segala-galanja.

Tatkala pergerakan kebangsaan kita ditahoen 1929 ditimpah marabahaja, P.P.P.K.I. dimoeka sekali, menjatakan kedoea tjitaannja.

Sekarang kedoea kalinja bangsa kita didalam kedoea tjitaan. Pemandangan voorzitter B.O. diatas menoendjoekkan soedah akibatnja, ordonnantie itoe, djika berlakoe didalam keadaan jang normal. Pemoeka-pemoeka P.B.I. tadi malam menoendjoekkan akibatnja djika dilawan dengan “lijdelijk verzet”. Kedoea-doeanja membawa bangsa kita kekoehoer.

Tidak ada lain djalan dalam hal ini dari pada mengikoeti kehendak ordonansi ini jang sesoenggoehnja, jaitoe bersedia menoetoeop segala pergoeroean kita, djika regeering tiada mempoenjai sebab-sebab akan melihat kesalahannja ini dan kembali kepada djalan jang benar.”¹⁶¹

Untuk meredam protes dari kalangan pergerakan nasional, pemerintah kolonial mengeluarkan keterangan lebih jauh mengenai Ordonansi “Sekolah Liar” (*toelichtende circulaire*) pada akhir November 1932.¹⁶² Keterangan yang itu berisi pernyataan pemerintah kolonial mengenai tujuan ordonansi tersebut yang tidak lain hanyalah untuk menjaga kualitas pendidikan di Hindia Belanda dan ordonansi tersebut hanya mengenai “sekolah-sekolah liar” yang sebenarnya. Tajuk rencana *Soeara Oemoem* berjudul “Circulaire sekolah ‘Liar’” menilai bahwa pada dasarnya pemerintah kolonial mulai mendengar protes-protes yang dilontarkan oleh rakyat

¹⁶¹ *ibid.*

¹⁶² Keterangan tersebut dimuat dalam *Soeara Oemoem* tanggal 28 November 1932 no. 49.

bumiputra.¹⁶³ Namun demikian, dalam artikel itu disebutkan bahwa pemerintah kolonial tetap akan menghilangkan elemen buruk dalam pendidikan partikelir. *Circulaire* itu dianggap sekadar keterangan yang tidak mengubah wujud ordonansi tersebut. Namun, upaya ini dianggap sebagai suatu hal yang positif oleh *Soeara Oemoem* dan akan membawa pengaruh baik bagi hubungan pemerintah kolonial dengan rakyat Indonesia apabila ordonansi tersebut ditarik kembali, seperti yang disebutkan dalam tulisan tersebut:

“ Sikap regeering dengan mengeloearkan circulaire ini ada sympahtiek, tetapi tidak toeloes teroes.

Kehormatan Regeering tidak bisa diperbagoes dengan tarik disini, oeloer disana, tetapi dengan terang-terangan menarik jang salah dan mengembalikan jang benar.

Kita rasa dengan sikap demikian boekan sedikit kemenangan regeering dimata ra'jat, boekannja seperti sekarang ini dioeloer kepada ra'jat geest (oedjoed)-nja ordonansi itoe, tetapi ditahan dengan segala kekerasan formaliteit-nja.

Kita tinggal mempertimbangkan kepada regeering, soepaja ordonnantie itoe ditarik kembali sadja.”¹⁶⁴

Salah satu keputusan konferensi PPPKI yang diadakan pada awal bulan November 1932 ialah akan mengadakan *massa-actie* bersama dan rapat-rapat raksasa di berbagai tempat untuk menentang Ordonansi “Sekolah Liar” pada tanggal 11 dan 18 Desember 1932.¹⁶⁵ Tjindarboemi dalam tajuk rencana yang berjudul “Peladjaran Sekarang” menulis mengenai *massa-actie* dan rapat-rapat yang diadakan pada tanggal 11 Desember 1932.¹⁶⁶ Momen tersebut dinilai sebagai masa bersatunya kalangan

¹⁶³ *Soeara Oemoem*, 28 November 1932 no. 49.

¹⁶⁴ *ibid.*

¹⁶⁵ John Ingleson, *op.cit.*, hal. 229.

¹⁶⁶ *Soeara Oemoem*, 14 Desember 1932 no. 63.

pergerakan dalam rangka perlawanan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar”. *Soeara Oemoem* berpendapat bahwa persatuan itu disebabkan oleh adanya perasaan kebangsaan di tiap-tiap kalangan pergerakan sehingga perbedaan yang selama ini muncul dapat disatukan.

“ Dari sini diboektikan, bahwa faham bangsa kita tentangan bahaja wilde-scholenordonnantie itoe tidak berbeda lagi. Kiri dan kanan berdoeka, karena ordonansi itoe.

Dari sini diboektikan poela, bahwa pengikat selatorachim bangsa kita dalam kepentingan bersama tidak lain melainkan dari pada azas kebangsaan djoea.

Sarekat Islam toeroet berdoeka boekan karena dasar keislamannja, boekan sebab sifatnja jang internasional, tetapi semata-mata oleh karena perasaan kebangsaan-nja berkata. Begitoe poela adhaesie Partai Indonesia dan P.N.I. boekan disebabkan oleh karena dasar mereka itoe marhaenistis atau kedaulatan ra’jat, tetapi poela semata-mata oleh karena perasaan satoe bangsa.

Seteroesnja begitoe djoega sikap Boedi Oetomo, P.B.I. dan lain-lain pergerakan, boekan karena dasar mereka itoe ada keningratan, tetapi sebab djantoeng hati perhimpoean-perhimpoean ini ada terletak didalam nationalisme jang loeas dan lebar.”¹⁶⁷

Tjindarboemi menyatakan bahwa aksi penentangan Ordonansi “Sekolah Liar” yang dilakukan oleh kalangan pergerakan bumiputra merupakan penyatuan dua urusan yang biasanya terpisah di mana ada satu pihak yang tidak ingin mencampuri pihak lainnya, yakni urusan sosial dan politik. *Soeara Oemoem* mengharapkan adanya persatuan antar berbagai kalangan pergerakan dan mengkritik sebagian kalangan yang senang memisahkan dirinya, serta memperuncing perbedaan.

“ Kedjoedjoeran dan ketoeloesan hati moestinja haroes mengakoei perhoeboengan jang erat antara gerakan sociaal dan politiek, tetapi tidak: orang lebih soeka memperkosa kedjoedjoeran aliran pikiran sendiri oentoe hanja memperolok ideologie sendiri!

¹⁶⁷ *ibid.*

. . . Kedjoedjoeran dan ketoeloesan hatilah kepada aliran pikiran sendiri (eerlijk zijn tegenover zichzelf) mendjadi satoe pasal jang haroes dan perloe dioetamakan oleh pemoeka-pemoeka kita didalam pelbagai ideologie-nja, sebab boekti-boekti sekarang ini adanja hanja memperolok pendirian kita sendiri!”¹⁶⁸

Soeara Oemoem sendiri memperlihatkan kritiknya terhadap kelompok nasionalis sekuler nonkooperasi yang tergabung dalam Partindo dan PNI-Baru.¹⁶⁹ Pada bulan Desember 1932, kedua partai itu mengalami perselisihan ideologi mengenai asas nonkooperasi akibat adanya tawaran kepada Hatta untuk duduk dalam *Tweede Kamer*. Menurut *Soeara Oemoem*, perselisihan tersebut sudah seharusnya dihentikan mengingat kondisi saat ini yang cukup kondusif untuk menjalin persatuan dalam aksi penentangan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar”. *Soeara Oemoem* menilai tokoh-tokoh Partindo dan PNI-Baru terlalu banyak berteori. Ki Hadjar Dewantara kemudian dijadikan contoh sebagai sosok yang hanya berasal dari gerakan pendidikan dan bukan politik, namun tidak banyak berteori dan radikal serta mempunyai prinsip yang teguh dalam perilakunya.

Berbeda dengan tanggapannya terhadap Budi Utomo, *Soeara Oemoem* dalam sebuah tajuk rencana yang berjudul “Boedi Oetomo” memuji keputusan Budi Utomo yang mulai menunjukkan ketegasannya terhadap pemerintah kolonial dalam kaitannya dengan penentangan Ordonansi “Sekolah Liar”.¹⁷⁰ Pengurus pusat Budi

¹⁶⁸ Artikel tersebut menyebutkan salah satu contohnya adalah Ki Hajar Dewantara itu sendiri yang sebelum adanya permasalahan ordonansi ini bergerak di bidang pendidikan. Selain itu juga dituliskan bahwa salah satu pembicara, yang digolongkan sebagai politikus, dalam sebuah rapat umum PPPKI di Surabaya mengatakan kunci dari keberhasilan pergerakan menuju kemerdekaan adalah pendidikan. Lihat: *ibid.*

¹⁶⁹ *Soeara Oemoem*, 22 Desember 1932 no. 70.

¹⁷⁰ *Soeara Oemoem*, 29 Desember 1932 no. 74.

Utomo pada akhir bulan Desember 1932 memang mengeluarkan instruksi kepada segenap anggotanya yang duduk di *volksraad* untuk meninggalkan tempatnya apabila ordonansi tersebut tidak segera ditarik oleh pemerintah kolonial. Selain itu, organisasi ini juga menyatakan dukungannya sepenuhnya terhadap Ki Hadjar Dewantara dengan cara mengadakan pengumpulan uang untuk menyokong orang-orang yang terkena jeratan ordonansi tersebut. *Soeara Oemoem* memberi sanjungan dengan menyebutkan bahwa tindakan Budi Utomo luar biasa dan sudah melewati batas aturan organisasinya sendiri. Keputusan Budi Utomo itu membuat *Soeara Oemoem* menyatakan bahwa kemenangan ada pada pihak pergerakan nasional.

Linea Recta dalam kolom “Teropong XLI” mencoba menyampaikan usulan mengenai salah satu upaya penanggulangan apabila Ordonansi “Sekolah Liar” telah memakan korban.¹⁷¹ Linea Recta menyatakan bahwa dukungan dari kaum perempuan dan kaum istri sangat penting dalam aksi penentangan terhadap ordonansi tersebut. Artikel itu memberikan contoh dari dukungan tersebut, yakni melalui sebuah pameran produk-produk kerajinan tangan yang dibuat oleh kaum perempuan dan kaum istri di seluruh Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Hasil penjualan tersebut rencananya akan diberikan kepada orang-orang bumiputra yang menjadi korban dari ordonansi tersebut.

“ Hatta maka maksoed Teropong ini hendak memberi sedikit timbangan kepada poeteri-poeteri Indonesia di seloeroeh tempat akan memboeat (mengadakan) tentonseteleng (pertoendjoekan) pada 31 hari boelan Mar, jaitoe ketika habis tempoh akan berlakoenja ordonansi liar itoe. Jang akan dipertoendjoekkan jaitoe sekalian matjam perboetan roemah tangga, perboetan

¹⁷¹ Linea Recta, “Kaoem iboe (isteri) boleh menoendjang korban ordonansi sekolah liar”, *Soeara Oemoem*, 30 Desember 1932 no. 75.

tangan, seperti pendjahitan, pembatikan, renda-renda, tenoen-tenoenan, pakaian anak-anak, boeaian, petji, barang swadeshi dan l.l.s.b.

. . . Pertoendjoekan demikian seminggoe lamanja soedah tjoekoep dan dari pada barang pendjoealannja akan dihadiahkan seberapa soeka sipengirim oentoek fons korban ordonansi itoe.”¹⁷²

Sementara itu, Tjindarboemi dalam tajuk rencana berjudul “Tjatatan” mengeluarkan usulan lain mengenai langkah-langkah pencegahan yang penting.¹⁷³

Tjindarboemi menyatakan bahwa persiapan yang lebih jauh diperlukan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan pemerintah kolonial melalui ordonansi tersebut.

Massa-actie dan *lijdelijk verzet* dirasakan masih menyimpan kelemahan, yakni apabila pemerintah menindak perguruan nasional, gerakan penentangan tidak akan

berguna lagi untuk menyelamatkan perguruan nasional yang terpaksa ditutup karena kekurangan guru. Tindakan yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan guru-

guru pengganti sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang baik pula. Tulisan tersebut juga mengkritik Ki Hadjar Dewantara tentang murid-murid perguruan nasional yang

mengambil bagian dalam aksi ini.

“ Apa maksoed Ki Hadjar dengan mengandjoerkan *lijdelijk verzet* ini? Tidak lain melainkan bahwa beliau dengan soenggoeh hati hendak mempertahankan kemerdekaan sekolah nasional. Tapi aksi itoe boekan berarti bahwa, djika kelak soedah datang waktoenja oesaha kita akan dikoetjar-katjirkan.

Itoe menjeroepai kepada *anarchie* namanja. Bagi kita tiada benar adanja, djika seorang moerid haroes djoega mendjadi *volunteer*. Jang ditangkap kelak karena perlawanan ini jaitoe hanja kaoem goeroe-goeroe dan bestuur perhimpoean sekolah. Djikalau moerid-moerid dibiarkan poela boleh toeroet masoek boei, artinja itoe pada soeatoe masa moerid diangkat mendjadi goeroe dari pada dirinja sendiri. Keadaan ini tidak sehat!

. . . Djikalau datang waktoenja goeroe-goeroe sekolah liar kita kelak haroes masoek boei, maka jang pertama haroes didjaga, jaitoe kepastian onderwijs

¹⁷² *ibid.*

¹⁷³ *Soeara Oemoem*, 7 Januari 1933 no. 82 .

nasional kita boleh berdjalan teroes seperti tidak ada apa-apanja. Artinja kaoem volunteers kita jang tjakap mengganti tempat goeroe-goeroe itoe dan pemimpin-pemimpin kita jang diwadjibkan mengganti kedoedoekan beberapa madjelis sekolah itoe, pada waktoe itoe, haroes bersedia dengan segala kelengkapannja.

Jang demikian itoe haroes berarti bahwa pengganti-pengganti goeroe kita seboleh-bolehnja tidak koerang ketjakapannja dari pada jang diboei dst.nja.”¹⁷⁴

Aksi penentangan Ordonansi “Sekolah Liar” yang sudah berlangsung sepanjang akhir tahun 1932 mendapat perhatian dari wakil-wakil rakyat Indonesia di *Volksraad*. P.A.A. Wiranatakoesoema bersama rekan-rekan Indonesia lainnya di *Volksraad*, pada tanggal 10 Januari 1933, mengajukan mosi untuk menarik kembali ordonansi tersebut dan menggantinya dengan yang lama selama satu tahun sebelum ditetapkan yang baru oleh sebuah komisi.¹⁷⁵ Tjindarboemi di dalam tajuk rencana yang berjudul “Oentoek Harga *Volksraad*” membahas usulan Wiranatakoesoema di dalam *Volksraad*.¹⁷⁶ Artikel itu juga memuat pertemuan antara Thamrin dan Wiranatakoesoema, yang merupakan anggota *Volksraad*, dengan Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui seperti apa kira-kira perubahan yang akan dilakukan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” sehingga ordonansi tersebut bukan lagi merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi sekolah-sekolah partikelir, khususnya perguruan nasional seperti Taman Siswa dan lainnya. Pembahasan mengenai *initiatief voorstel* Wiranatakusuma di *Volksraad* mendapatkan perlawanan dari pihak anggota yang berasal dari golongan Eropa. Sikap

¹⁷⁴ *ibid.*

¹⁷⁵ Sajoga, *op.cit.*, hal. 237.

¹⁷⁶ *Soeara Oemoem*, 11 Januari 1933 no. 85.

seperti ini dinilai akan menghilangkan upaya penyelesaian masalah dengan cara yang baik seperti yang telah dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara dan pengikutnya. Selain itu, sikap tersebut juga akan semakin memperuncing jurang pemisah antara kaum “sini” dan kaum “sana” atau kaum “putih” dan kaum “hitam”. Pandangan rakyat Indonesia terhadap *Volksraad* juga akan semakin memburuk dan hilang kepercayaannya. Oleh karena itu, Tjindarboemi mengharapkan adanya kerja sama antarseluruh anggota di *Volksraad* dalam rangka memperjuangkan adanya perubahan dalam ordonansi tersebut, seperti yang dinyatakan dalam kutipan artikel berikut ini:

“ Prikkels dan prikkelstemmingen haroes ditekan, dimatikan. Dengan kepala dingin dan hati jang tenang haroes dilihat dan dipandang ordonansi jang dibawa ke Volksraad itoe, dan kita yakin, bahwa dalam keadaan jang demikian, tentoe tiap-tiap anggauta—dengan tiada perloe meroesakkan dan menoeroenkan deradjat golongan bangsa atau orang—membenarkan halnja, bahwa didalam soesoenan seperti sekarang ini, ordonansi itoe soesah boleh dipertahankan.

Kita mengapel kepada anggauta-anggauta Volksraad semoeanja, soepaja disingkirkan perasaan-perasaan masing-masing jang *subjectief*.

Setjara kawan, dengan toeloes dan ichlas, boeat sekali ini sadja, marilah anggauta-anggauta Volksraad bekerdja bersama-sama oentoek menolak ordonansi itoe.

Boekankah dengan tjara begini, hanja boleh ditinggikan harganja Volksraad itoe dimata ra'jat djelata ini?

Harga Volksraad ada banjak tergantoeng dari pada poatoesannja sendiri sekali ini!”¹⁷⁷

Sikap *Soeara Oemoem* yang mendorong permasalahan Ordonansi “Sekolah Liar” agar dapat diselesaikan dengan kerja sama yang baik dari pemerintah kolonial terlihat dalam tajuk rencana yang ditulis oleh Tjindarboemi dengan judul “Wilde-

¹⁷⁷ *ibid.*

scholen-ordonnantie”.¹⁷⁸ Artikel tersebut pada dasarnya mengulas sikap Schrieke dalam menanggapi *initiatief-voorstel* Wiranatakoesoema. Schrieke mengungkapkan bahwa pemerintah kolonial menganggap pembicaraan yang telah dilakukan di dalam *volksraad* memberi masukan positif sehingga pemerintah kolonial dapat mengeluarkan keputusan terhadap ordonansi yang mendapat banyak tentangan itu. Keputusan pemerintah kolonial, yang disampaikan oleh Schrieke, adalah bersedia mengubah ordonansi tersebut dalam peraturan “permintaan izin” yang diganti dengan “pemberitahuan”.

“ Dari sini njata bahwa pada Regeering ada kesoenggoehan hati akan mengobah ordonantie jang tidak baik itoe dengan begitoe tjara, hingga tidak perloe ada bentrokan antara Regeering dan Ra’jat. Sikap ini ada sikap jang sehat sekali, berarti satoe kemenangan dari Regeering, jang dilain kesempatan, djika seteroesnja voorstle ini akan diterima, akan mendapat pembitjaraan lebih djaoeh lagi dari kita.

Sementara boleh diharap ordonantie jang menggemparkan ini boeat sebagian besar tidak lagi mendjadi kechwatiran.”¹⁷⁹

Penentangan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” berakhir dengan diubahnya isi sebagian ordonansi tersebut oleh pemerintah kolonial. Ki Hadjar Dewantara melalui imbauannya yang dimuat di segenap surat kabar, termasuk *Soeara Oemoem*, menyatakan aksi *lijdelijk verzet* terhadap ordonansi tersebut sudah berakhir dan mengimbau pendukung pergerakan nasional untuk tetap waspada serta siaga untuk

¹⁷⁸ *Soeara Oemoem*, 4 Februari 1933 no. 105.

¹⁷⁹ *ibid.*

menghadapi segala ancaman yang menyerang pergerakan dan kepentingan rakyat bumiputra.¹⁸⁰

Artikel terakhir yang mengandung opini *Soera Oemoem* mengenai permasalahan Ordonansi “Sekolah Liar” ini muncul pada kolom “Teropong XLVIII” yang ditulis oleh Linea Recta.¹⁸¹ Artikel tersebut mengungkapkan bahaya berikutnya yang akan mengancam bidang pendidikan bumiputra setelah masalah Ordonansi “Sekolah Liar” ini selesai. Bahaya tersebut terdiri dari dua macam. *Pertama*, Linea Recta menyebutkan bahwa Schrieke yang menjabat sebagai kepala *Departement Onderwijs* akan digantikan oleh Dr. Kraemer. Penggantian Schrieke oleh Kraemer ini mendapat tentangan yang cukup keras dari kalangan Islam.¹⁸² *Kedua*, sekolah rendah (*volledige scholen*) yang akan diubah menjadi sekolah desa.¹⁸³ Perubahan status sekolah ini dianggap oleh Linea Recta sebagai penurunan kualitas dan kuantitas pendidikan untuk bumiputra. Rakyat bumiputra pun disebutkan dalam artikel tersebut tidak berminat terhadap sekolah desa karena kualitasnya yang kurang begitu baik. Selain itu, Linea Recta menyebutkan bahwa guru-guru bumiputra yang mengajar di sekolah rendah terancam kehilangan pekerjaannya karena pengurangan dan

¹⁸⁰ Maklumat Ki Hadjar Dewantara tersebut dimuat di dalam *Soera Oemoem* tanggal 4 Maret 1933 no.129.

¹⁸¹ Linea Recta, “Politik onderwijs dan bahajanja”, *Soera Oemoem*, 6 Maret 1933 no. 130.

¹⁸² Artikel tersebut menyebutkan bahwa Kraemer sebelumnya menyatakan akan melakukan kristenisasi penduduk Bali. Selain itu disebutkan pula bahwa sebelumnya sikap dan pernyataan Kraemer menimbulkan protes dan pembentukan kelompok-kelompok pembela Islam untuk menentang pernyataan tersebut. Lihat: *ibid.*

¹⁸³ Artikel tersebut menyebutkan bahwa sekitar 1200 sekolah rendah di Jawa Barat sedang dalam proses perubahan status menjadi sekolah desa. Lihat: *ibid.*

perubahan status sekolah tersebut berhubungan dengan pengurangan guru-gurunya pula.

B. *Persatoean Indonesia*

Sama halnya dengan *Soeara Oemoem*, *Persatoean Indonesia* juga memuat salinan telegram Ki Hadjar Dewantara sebagai permulaan pemberitaan tentang Ordonansi Sekolah “Liar”.¹⁸⁴ Tanggapan atau pandangan *Persatoean Indonesia* mengenai Ordonansi “Sekolah Liar” dapat dilihat dalam tulisan redaksi pada halaman pertamanya yang berfungsi sebagai tajuk rencana. Tulisan-tulisan lainnya dapat dilihat dalam bagian lain surat kabar, baik yang ditulis oleh redaksi surat kabar sendiri maupun oleh kontributor surat kabar. Namun demikian, tulisan-tulisan tersebut tidak diletakkan secara sistematis melalui kolom-kolom yang jelas seperti yang terdapat pada *Soeara Oemoem*. Hal ini disebabkan oleh bentuk *Persatoean Indonesia* yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan *Soeara Oemoem*. Tajuk rencana dan artikel-artikel tersebut biasanya ditulis oleh pimpinan redaksi, seperti Njonoprawoto dan G.R. Pantouw beserta redaksi lainnya yang pada umumnya menggunakan nama samaran atau nama pena.

Tanggapan *Persatoean Indonesia* terhadap pelaksanaan Ordonansi “Sekolah Liar” dan aksi penentangannya yang dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara muncul pertama kali pada edisi ganda tertanggal 20—30 Oktober 1932. Tema besar edisi

¹⁸⁴ Salinan telegram Ki Hajar Dewantara dimuat dalam *Persatoean Indonesia* no. 153 tanggal 10 Oktober 1932.

Persatoean Indonesia pada nomor ini memang membahas isu mengenai Ordonansi “Sekolah Liar”. Tulisan pertama merupakan *headline* berjudul “Pergerakan Indonesia dan Sekolah-Sekolah Boeas”, ditulis oleh redaksi yang berinisial P.¹⁸⁵ *Persatoean Indonesia* menilai bahwa Ordonansi “Sekolah Liar” ditetapkan oleh pemerintah yang sedang dalam kondisi kalut akibat tekanan dari berbagai pihak yang disebut oleh *Persatoean Indonesia* sebagai pihak “sana” dan “sini”. Tekanan tersebut muncul akibat kebijakan penghematan pemerintah, baik di bidang pendidikan maupun pengurangan gaji pegawai negeri, dan sikap campur tangan pemerintah terhadap urusan internal pabrik-pabrik gula serta sistem penjualannya. *Persatoean Indonesia* menilai bahwa pada akhirnya, rakyat jajahanlah yang akan menanggung kerugian berupa pelarangan sekolah-sekolah partikelir yang didirikan oleh rakyat bumiputra secara mandiri.

Persatoean Indonesia dalam tulisan ini menyebutkan beberapa keburukan yang dinyatakan pemerintah kolonial terhadap sekolah-sekolah partikelir tak bersubsidi. Keburukan-keburukan tersebut antara lain tempat pengajaran yang tidak sehat, pengajar yang tidak berkualitas, biaya pendidikan yang tidak sepadan dengan pelajaran yang diberikan, nama sekolah yang tidak sesuai dengan kualitas pengajarannya, dan penggunaan nama sekolah pemerintah kolonial tetapi kualitas pengajarannya tidak sama dengan sekolah pemerintah kolonial. Pendapat pemerintah kolonial itu disanggah oleh *Persatoean Indonesia* dalam artikel tersebut bahwa

¹⁸⁵ *Persatoean Indonesia*, 20—30 Oktober 1932 no. 154—155. Redaksi yang berinisial P. ini adalah Njonoprawoto, *hoofdredacteur Persatoean Indonesia*, seperti yang tertulis dalam bagian atas lembar pertama surat kabar.

sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah lingkungan tempat tinggal rakyat Indonesia di desa-desa yang tingkat kesehatannya justru lebih rendah dibandingkan dengan tempat-tempat sekolah partikelir tak bersubsidi yang akan diberantas itu.

Persatoean Indonesia juga menilai bahwa anggapan pemerintah kolonial mengenai sekolah-sekolah partikelir tak bersubsidi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum negeri jajahan adalah tidak benar. Anggapan pemerintah kolonial tersebut dinilai oleh *Persatoean Indonesia* hanya sebagai alasan untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah kolonial, seperti yang dinyatakan dalam kutipan tulisan ini:

“ Dan djoega kami tak mengerti perhoeboengannja “openbare orde en rust” dengan sebab-sebab jang memaksa pemerintah mengadakan atoeran-atoeran seperti ordonantie wilde scholen itoe.

Kami telah beratoes-ratoes kali, barangkali beriboe-riboe kali, mengatakan, bahwa “openbare orde en rust” ini hanjalah tedeng aling-aling oentoek menghilangkan bisanja seorang jang tak disoekai oleh pegawai-tinggi, seperti telah dijatakan oleh Digoel-Rapport-Hillen.

Kini poela dalam ordonnantie “sekolah boeas” itoe, seperti djoega dalam ordonnantie poengoetan-derma, dimadjoekan topeng “keamanan-oemoem” itoe.”¹⁸⁶

Dalam artikel ini juga disebutkan akibat yang berbahaya bagi bangsa Indonesia apabila ordonansi tersebut benar-benar sepenuhnya diberlakukan. Pelaksanaan ordonansi ini akan mematikan daya upaya rakyat Indonesia dalam lapangan sosial dan ordonansi tersebut memberikan kewenangan yang tak terbatas bagi kepala daerah (*amtenar*) yang bertugas mempertimbangkan pemberian izin pendirian sekolah dan pengajaran. Dalam kalimat terakhir artikel pertama yang

¹⁸⁶ *ibid.*

menyambut datangnya ordonansi tersebut, *Persatoean Indonesia* menyatakan dukungannya terhadap penolakan ordonansi itu. Sikap dukungan itu didasarkan pada kepada sikap Partindo sebagai partai yang menaungi *Persatoean Indonesia*.

“ Sikap pemimpin Taman-Siswa itoe jang disetoedjoei oleh Madjelis Loehoer dan Taman-Siswa seloeroehnja mendapat perhatian diseloeroeh golongan rakjat Indonesia, dan seharoesnjalah mendapat sokongan dari partai-partai politik kebangsaan. Partai Indonesia djoega soedah menjetoedjoei sikap Ki Hadjar Dewantara itoe. Karena boekanlah ordonnantie ini ditoedjoean kepada sebagian ketjil daru rakjat Indonesia, melainkan kepada segala bagian. Dan djika ordonnantie ini berdjalan, maka akibatnja tidak lain dan tidak boekan jalah: Masjarakat Indonesia jang soedah roesak lahir dan bathinnja, akan bertambah roesak dan achirnja batinnja masjarakat kita akan moesna sama sekali. Oleh sebab itoe kami berseroe: Insjafkanlah dan pertahankanlah akan hak jang soetji, soepaja djanganlah diinjadjak-indjakkan.”¹⁸⁷

Edisi *Persatoean Indonesia* nomor ini pada dasarnya memang memuat permasalahan Ordonansi “Sekolah Liar”. Oleh karena itu, di dalam terbitan kali ini, artikel dan berita yang dimuat pada umumnya membahas permasalahan itu. Salah satu artikel yang dimuat adalah artikel yang dibuat oleh Muhammad Yamin dengan judul “Menoedjoe Kongres Pengadjaran dan Pendidikan Indonesia”.¹⁸⁸ Artikel tersebut berisi anjuran Muhammad Yamin untuk segera mengadakan kongres pengajaran-pendidikan Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga berpendapat bahwa sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan kepada rakyat jajahan. Anjuran Muhammad Yamin untuk mengadakan kongres dilatarbelakangi oleh keinginannya akan adanya persatuan aliran dan tujuan yang menaungi pendidikan rakyat. Persatuan itu sangat

¹⁸⁷ *ibid.*

¹⁸⁸ Muhammad Yamin, “Menoedjoe Kongres Pengadjaran dan Pendidikan Indonesia”, *Persatoean Indonesia*, 20—30 Oktober 1932 no. 154—155.

penting pada saat pendidikan rakyat sedang terancam oleh peraturan pemerintah kolonial.

Pada kolom yang bernama “Pemandangan Tentang Pidatonja” terdapat catatan redaksi mengenai pidato dari Sartono mengenai ordonansi ini.¹⁸⁹ Artikel tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya dalam *Indische Staatsregeling* terdapat kewajiban pemerintah kolonial untuk memberikan pengajaran kepada penduduk asli. Namun, pada kenyataannya, pemerintah kolonial tidak dapat memenuhi kebutuhan itu. Pengeluaran pemerintah kolonial untuk pendidikan penduduk bumiputra jauh lebih rendah daripada negara yang lain. Oleh karena itu, banyak rakyat bumiputra yang buta huruf. Anggaran pengeluaran pemerintah memperlihatkan jurang yang sangat lebar antara pengeluaran untuk pendidikan bumiputra dan pengeluaran kepentingan pemerintah kolonial yang lainnya. Artikel tersebut menyebutkan penyebab keganjilan itu.

“Apakah sebabnja perbedaan ini? Tak lain dan tak boekan oleh karena ada doea matjam atoeran, jaitoe: atoeran boeat pendjadjah dan atoeran boeat jang didjadjah. Karena boeat si pendjadjah adalah berlakoe fasal 181 dari I.S. Disanalah tertoeelis, bahwa “Menoeroet atoeran-atoeran jang haroes ditentoeken dalam ordonnantie, maka, dimana terasa keperloeian akan pendidikan oentoek pendoedoek Eropah dan tidak ada keberatan soeatoe apa, maka disanalah diberikan pengadjaran rendah dengan setjoekoepnja”. Perkataan setjoekoepnja tidak ada dalam atoeran boeat rakjat Indonesia; sehingga terpaksalah kita memandang adil segala pengeloeran pemerintah oentoek rakjat Indonesia, djika pandangan kita didasarkan pada atoeran-atoeran jang berbeda itoe.”

¹⁸⁹ *Persatoean Indonesia*, 20—30 Oktober 1932 no.154—155.

Edisi *Persatoean Indonesia* yang membahas Ordonansi “Sekolah Liar” ini juga memuat keterangan yang cukup mendetail mengenai ordonansi baru ini dan memperlihatkan perbandingan dengan ordonansi pendidikan partikelir sebelumnya. Keterangan tersebut berjudul “Ordonnantie Sekolah-Sekolah Boeas”.¹⁹⁰ *Persatoean Indonesia* kembali menekankan bahwa ordonansi ini mempunyai celah berbahaya yang dapat mematikan kemerdekaan rakyat bumiputra.

“ Bagi siapa jang memperhatikan benar-benar ordonnantie baroe ini tentoe teranglah padanja bahwa sifat oendang-oendang ini boekan lagi sifat ‘toezicht’ mengamat-amati.

Nasib pergoeroean partikelir dengan adanja ordonnantie baroe ini soenggoeh tergantoeng kepada subjective inzichten dari fihak jang diwadjabkan mendjalankan ordonnantie itoe. Dalam praktik akan ternjata bahwa ordonnantie ini akan mematikan kemerdekaan Rakjat kita oentoek mengadakan pengadjaran dan pendidikan jang sesoeai dengan angan-angan dan tjita-tjita kita. Dan memang benarlah anggapan Ki Hadjar Dewantoro tentang ordonnantie baroe ini, jaitoe bahwa ordonnantie itoe ‘mereboet haknja iboe bapa (ouderlijke rechten) atau rakjat oentoek memilih tjaranja pendidikan boeat anaknja, dan amat menghina kedoedoekan pengadjaran partikelir jang tidak bersifat mengamat-amati lagi, akan tetapi mengoesai atas barang kepoenjaan rakjat’.”¹⁹¹

G.R. Pantouw, yang merupakan redaktur pengganti *hoofdredacteur* Njonoprawoto, menulis artikel yang berjudul “Politik Kolonial dan Beban Rakjat Indonesia”.¹⁹² Di dalam artikel tersebut, Pantouw menganalisis kondisi perekonomian negeri jajahan yang sedang timpang antara pengeluaran dan pemasukan. Kondisi seperti ini menuntut pemerintah kolonial untuk menerapkan kebijakan penghematan di beberapa bidang, seperti anggaran pendidikan dan gaji pegawai negeri. Kebijakan

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *ibid.*

¹⁹² G.R. Pantouw, “Politik Kolonial dan Beban Rakjat Indonesia”, *Persatoean Indonesia*, 10 November 1932 no. 156.

penghematan ini kemudian diikuti oleh kebijakan untuk menaikkan pajak, seperti tembakau dan garam. Hal itu, menurut Pantouw, menambah beban hidup rakyat bumiputra. Namun demikian, Pantouw menyebutkan bahwa kondisi seperti ini tidak menimbulkan protes yang berarti dari rakyat bumiputra karena hanya terkait masalah “lahir”. Protes yang keras justru terjadi terhadap kebijakan pemerintah kolonial terhadap sekolah-sekolah swasta yang menampung cukup banyak rakyat bumiputra. Protes tersebut muncul karena pemerintah kolonial telah berani menyinggung bagian yang disebut “kebatinan-timoer”.

“ Akan tetapi, malang seriboe malang, rakjat Indonesia masih bernjawa dan berdarah ketimoeran dan lebih mementingkan rohani dari pada perkara lahir. Herankah, djika ordonnansi onderwijslah jang dilawani keras? Memang Timoer tinggal Timoer dan orang Barat tak akan dapat mengoekoer atau mendoega tebalnja kebatinan rakjat Timoer itoe.

Kalau imperialisme tiap-tiap tahoen mengangkoet rata-rata 500 miljoen roepiah dari tanah Indonesia, maka bertahoen-tahoen telah berdjalan baroe timboel perlawanan.

Akan tetapi kalau ada jang mengantjam dengan terang-terangan kebatinan-timoer, maka dengan segeralah berdengoeng soeara bersama jang mengatakan: Ingatlah! Berbaliklah!

Memang, tak lain dari pada sikap seperti inilah jang menjinari masjarakat timoer.

Rakjat Indonesia sebagai sebagian daripada masjarakat timoer seharoesnjalah menginsjafkan roch dan njawa ketimoeran ini dan membela kebatinan timoer itoe disamping kewajibannja oentoek menoentoet Indonesia Merdeka.”¹⁹³

G.R. Pantouw kembali menulis tajuk rencana berjudul “Lakon Pendahoeloean” yang berisi tanggapan *Persatoean Indonesia* terhadap keputusan Konferensi PPPKI di Yogyakarta, yang akan memutuskan untuk mendukung secara

¹⁹³ *ibid.*

penuh aksi penentangan Ordonansi “Sekolah Liar”.¹⁹⁴ Pantouw melihat bahwa dengan kesepakatan itu, pergerakan nasional dan rakyat bumiputra seutuhnya sudah terang-terangan melihat adanya ancaman yang berarti terhadap pendidikan rakyat.

“ Oleh poetoesan ini, maka bolehlah dipandang bahwa rakjat Indonesia seoemoemnja soedah mengakoei dengan seterang-terangnja, jang “wilde-scholen ordonnantie” itoe soedah terasa sebagai antjaman terhadap pendidikan rakjat Indonesia dan sekoerang-koerangnja sebagai seboeah atoeran jang sangat meloekai perasaan keadilan jang terkandoeng dalam hati sanoebari rakjat Indonesia.

. . . Poetoesan jang diambil oleh P.P.P.K.I. di kota Mataram itoe mengandoeng arti, bahwa perkoempoelan-perkoempoelan jang bernaeng dibawah pandjipandjinja itoe, sedia dan mengakoe akan mempertahankan, sampai pada ahirnja, hak jang terasa diserang itoe.”¹⁹⁵

Uraian tajuk rencana selanjutnya memperlihatkan sikap *Persatoean Indonesia* terhadap PPPKI yang anggotanya kebanyakan berasal dari partai dan organisasi moderat yang berasas kooperasi. *Persatoean Indonesia* secara tidak langsung menyatakan bahwa PPPKI selama ini adalah organisasi yang arah pergerakannya sedang dalam kondisi menyimpang. *Persatoean Indonesia* menilai rakyat Indonesia sebagai objek penderitaan dan semangat perjuanganlah yang membenarkan arah pergerakan PPPKI, seperti yang disebutkan dalam tajuk rencana itu:

“ Rakjat Indonesia jang menjetoedjoei dan bersedia oentoek menoenjang serta mempertahankan poetoesan P.P.P.K.I. itoe, tentoe telah menginsjafkan, bahwa sekali-kali boekanlah ia melewati batas-batas kemanoesiaan, melainkan ia hanjalah mengadjak gembala jang kesasar itoe, menoeroetkan domba-domba jang sedang dipanggil ketempat jang telah didjandjikan Toehan, jaitoe perbaikan nasib dan kemerdekaan.”¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Persatoean Indonesia*, 20—30 November 1932 no. 157—158 tahun ke-V.

¹⁹⁵ *ibid.*

¹⁹⁶ *ibid.*

Masalah Ordonansi “Sekolah Liar” kembali disebutkan dalam tajuk rencana *Persatoean Indonesia* edisi akhir tahun berjudul “Kalau tahoen berganti!”.¹⁹⁷ Artikel tersebut berisi kilas balik perjuangan nasional selama tahun 1932, khususnya perjuangan yang dilakukan oleh Partindo. Sepanjang kilas balik tersebut, aksi perlawanan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” dianggap memperluas pengaruh terhadap pergerakan radikal seperti yang diusung oleh Partindo.

“ Jang perloe diselidiki lebih djaoeh jalah timboelnja ordonnansi sekolah liar, jang berhoebongan dengan pesat madjoenja pergerakan radikal, jaitoe toetama Partindo. Dalam waktu jang pendek ini Partindo soedah dapat mengibarkan bendera merah-poetih-banteng-Indonesia hampir diseleroeh tanah Indonesia; dan sebagai reaksi dari pihak sana jang telah mendapat sanksi dari pemerintah Hindia-Belanda, maka ditimboelkan satoe ordonnansi jang akan merantainkan pergoeroean kebangsaan seomoemnja dan semangat banteng-Indonesia choesoensja.”¹⁹⁸

Persatoean Indonesia dalam artikel ini juga menyinggung posisi kaum kooperator, terutama yang duduk di dalam *Volksraad*, terhadap aksi perlawanan ini. Kaum kooperator menyatakan akan meninggalkan *Volksraad* apabila ordonansi tersebut tidak dibatalkan. *Persatoean Indonesia*, sebagai suara kaum nonkooperator, sedikit meragukan niat seperti ini karena kaum kooperator dinilai belum teruji dalam kondisi yang sebenarnya apabila ordonansi tersebut tidak dibatalkan. Pernyataan tersebut menyiratkan adanya keinginan Partindo untuk memperkuat garis nonkooperator dengan adanya momen perlawanan ini. *Persatoean Indonesia* mengharapkan sikap teguh kaum kooperator dalam menghadapi akibat dari perlawanan ini, yakni meninggalkan dewan perwakilan tersebut. Tahun 1933 dinilai

¹⁹⁷ *Persatoean Indonesia*, 20—30 November 1932 no. 160—161.

¹⁹⁸ *ibid.*

menjadi sebuah pembuktian apakah mosi yang sudah diputuskan dalam P.P.P.K.I akan dijalankan oleh segenap anggotanya yang kebanyakan adalah kaum kooperator.

“ Djika P.P.P.K.I. choesoensja dan kaoem cooperatoren oemoemnja, jang soedah toeroet menjiarkan mosi dan poatoesan konferensi di Mataram, betoel-betoel berpendirian toeloes-ichlas terhadap rakjat Indonesia seoemoemnja, maka tak lain pengharapan oemoem jalah: meninggalkan dewan-dewan perwakilan, jaitoe konsekwensi dari poatoesannja dan mosi jang disiarkannja, djika ordonnansi sekolah “liar” tidak dibatalkan.

Djika tiada demikian maka sikap P.P.P.K.I. dan kaoem-cooperatoren akan dianggap sebagai tontonan, sebagai “Spielerei” belaka.

Tahoen 1933 akan memboektikannja! Tegoeh kepertjajaan oemoem, bahwa sikap kaoem-cooperatoren akan ternjata sikap jang toeloes ichlas. Moga-mogalah!”¹⁹⁹

Sementara itu, dalam tajuk rencana *Persatoean Indonesia* edisi pertama bulan Januari 1933 berjudul “Awan Gelap” yang ditulis oleh redaksi bernama samaran Ana-i-guru, kembali membahas mengenai keadaan negeri jajahan yang sedang sulit perekonomiannya.²⁰⁰ Seperti sudah disebutkan pada artikel sebelumnya, kondisi seperti ini membuat pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan yang menambah beban rakyat.. Namun demikian, di sisi lain pemerintah kolonial tetap mengeluarkan biaya yang banyak untuk kepentingan pertahanan di negeri jajahan. Hal ini menurut *Persatoean Indonesia* dilakukan tanpa memikirkan kepentingan rakyat jajahan, terutama dari golongan bumiputra. *Persatoean Indonesia* beranggapan bahwa isu Ordonansi “Sekolah Liar” hanya dijadikan penarik perhatian rakyat Indonesia ke satu penjurus saja, sedangkan di penjurus lainnya pemerintah kolonial secara diam-diam menaikkan berbagai macam pajak yang akan membebani rakyat. Di saat seperti itu,

¹⁹⁹ *ibid.*

²⁰⁰ *Persatoean Indonesia*, 10 Januari 1933 no. 162.

Persatoean Indonesia menyatakan bahwa Partindo tidak hanya memperhatikan masalah ordonansi tersebut saja, tetapi juga semua masalah umum yang sedang terjadi.

“Rakjat Indonesia berdaja-oepaja sekarang oentoek menoentoet hilangnja ordonnansi sekolah “liar”. Boleh djadi ordonnansi sekolah “liar” ini diadakan oentoek menarik perhatian rakjat Indonesia kesoeatoe pendjoeroe jang diharap-harapkan berhoeboeng dengan niatan oentoek menaikkan bea ini dan itoe, jang semata-mata memberatkan beban rakjat.

Akan tetapi perhatian kita senantiasa tertoe djoe kepada segala pendjoeroe. Moment aksi Partindo tjoekoeplah oentoek memboektikannja. Boekan sadja ordonnansi sekolah liar jang diperhatikan, akan tetapi terlebih lebih nasib rakjat Indonesia seoemoemnja.”²⁰¹

Aksi penentangan Ordonansi “Sekolah Liar” yang diperjuangkan oleh wakil-wakil Indonesia di *Volksraad* mengundang tanggapan dari *Persatoean Indonesia*. Ana-i-guru menanggapi rancangan ordonansi yang diajukan oleh R.A.A. Wiranatakoesoema untuk menggantikan Ordonansi “Sekolah Liar”.²⁰² *Persatoean Indonesia* menilai bahwa isi rancangan tersebut tidak jauh berbeda dengan isi ordonansi yang sedang diprotes tersebut. Hal ini dianggap masih meninggalkan bahaya bagi sekolah-sekolah swasta milik kaum bumiputra.

“Djika kita memperbandingkan memorie van toelichting ini dengan apa jang telah dikeloearkan berhoeboeng dengan rantjangan Toezicht-ordonnantie particulier onderwijs Staatsblad 1932 No. 494, maka sebenarnja terlaloe koerang perbedaan. Perbedaan dalam kedoea keterangan itoe jalah hanja mengenai perubahan dari “permintaan izin” ke “pemberitahoean”, sehingga disini boleh dikatakan, bahwa segala keberatan-keberatan jang telah dimadjoekan oleh rakjat Indonesia terhadap pengamatan-pengamatan terhadap sekolah-sekolah partikelir itoe boleh dibilang beloem dilenjakkan oleh rantjangan perubahan jang dikeloearkan ini.

²⁰¹ *ibid.*

²⁰² *Persatoean Indonesia*, 20—28 Februari 1933 no. 166—167.

Siapa jang maoe mengetahoei lagi tentang keberatan-keberatan rakjat terhadap pengamatan sekolah “liar” itoe dipersilahkan membatja sekali lagi Persatoean Indonesia dari 10 September 1932, dari 10 Oktober 1932 dan selandjoetnja”²⁰³

Ana-i-guru juga menyatakan harapannya agar ordonansi tersebut diubah lebih mendalam lagi karena di akhir tulisan ia menuliskan, “*Kami mengeloearkan pengharapan, moedah-moedahan ordonnansi ini dibilitjarakan dengan fikiran tenang dan dengan alon-alon sadja.*”²⁰⁴

Tanggapan ini menjadi akhir dari pembahasan aksi penentangan Ordonansi “Sekolah Liar”. *Persatoean Indonesia* tidak pernah memuat salinan maklumat Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan aksi penentangan telah berakhir dan mendapatkan kemenangan. *Persatoean Indonesia* juga tidak menanggapi keputusan pemerintah kolonial yang menarik kembali *Toezicht Particulier Onderwijs* Tahun 1932. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor semaraknya aksi penentangan tersebut yang menurun pada saat rancangan Wiranatakoesoema dipertimbangkan oleh pemerintah kolonial. Bagi partai nonkooperasi yang menganggap dirinya radikal seperti Partindo, kondisi yang sudah menurun tersebut sudah tidak membawa keuntungan bagi tujuan partai.

²⁰³ *ibid.*

²⁰⁴ *ibid.*

C. Daulat Ra'jat

Sama halnya dengan *Soeara Oemoem* dan *Persatoean Indonesia*, pandangan *Daulat Ra'jat* mengenai Ordonansi “Sekolah Liar” dapat dilihat dari tajuk rencana dan artikel-artikelnya. Tajuk rencana biasanya terdapat di halaman pertama dan ditulis oleh dewan redaksi yang dipimpin oleh Hatta. Namun dalam *Daulat Ra'jat*, pembahasan mengenai Ordonansi “Sekolah Liar” tahun 1932 lebih banyak dimuat dalam artikel-artikel yang ditulis oleh redaksinya sendiri. Artikel-artikel tersebut pada umumnya berbentuk karangan-karangan panjang dan ruang lingkup pembahasannya meluas serta lebih banyak mengaitkannya dengan prinsip nonkooperasi. Hal ini mencerminkan sifat *Daulat Ra'jat* yang didaktis.²⁰⁵

Pembahasan mengenai Ordonansi “Sekolah Liar” pertama kali dimuat dalam edisi Oktober 1932. Artikel itu berjudul “Soal Onderwijs”.²⁰⁶ Pembahasan dalam artikel tersebut cukup luas, dimulai dari kondisi pendidikan di Jepang, kondisi pendidikan rakyat jajahan di Filipina, sampai dengan pembahasan kondisi pendidikan rakyat jajahan di Hindia Belanda yang semakin terpuruk dengan adanya ordonansi pendidikan yang baru.²⁰⁷

²⁰⁵ Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hal. 143—144.

²⁰⁶ *Daulat Ra'jat*, 10 Oktober 1932 no. 39.

²⁰⁷ *Daulat Ra'jat* dalam artikel tersebut menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan suatu bangsa. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan penting yang ditunjukkan oleh bangsa Jepang pada awal abad ke-20. *Daulat Ra'jat* juga melihat kondisi negeri jajahan di Filipina yang memberi kesempatan cukup luas bagi kaum bumiputra di sana untuk mengenyam pendidikan. Hadirnya bangsa Amerika sebagai bangsa penguasa yang baru di Filipina, memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum bumiputra. Setiap tahunnya, disebutkan dalam artikel tersebut, sekitar 200 orang bumiputra Filipina dikirim ke Amerika dan negeri-negeri Barat lainnya untuk mengenyam pendidikan tinggi. *Daulat Ra'jat* menilai bahwa kondisi ini semakin mendekatkan Filipina menuju kemerdekaannya. Lihat: *ibid.*

Kondisi pendidikan rakyat jajahan di Hindia Belanda digambarkan jauh berbeda dengan kondisi pendidikan rakyat jajahan di Filipina. Pada awal abad ke-20 digambarkan bahwa penduduk bumiputra di Hindia Belanda lebih dari 93 % masih dalam kondisi buta huruf dan tulis. Artikel tersebut menyatakan bahwa rakyat bumiputra yang berjumlah 50 juta jiwa hanya diberikan 16.158 tempat sekolah, sehingga yang mendapat kesempatan hanya sekitar 1.222.459 orang saja. Pemerintah kolonial tidak sepenuhnya mengeluarkan biaya karena sebagian dari pendidikan rakyat bumiputra ini dibiayai dan dipelihara oleh desa setempat. *Daulat Ra'jat* juga memberikan gambaran dari total jumlah pemuda bumiputra yang berusia antara 5 sampai 15 tahun, hanya 15,2 % yang dapat mengunjungi sekolah. Kebutuhan rakyat bumiputra akan pendidikan itu tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kolonial dan berusaha ditampung oleh organisasi-organisasi bumiputra yang ada melalui rumah-rumah sekolah yang dikembangkan seperti Taman Siswa dan lainnya. Kondisi yang sudah terpuruk ini kemudian bertambah sulit akibat timbulnya peraturan baru yang mengekang seperti Ordonansi "Sekolah Liar". Munculnya ordonansi tersebut, menurut *Daulat Ra'jat*, merupakan bentuk wajar dari ketakutan pemerintah kolonial setelah pergerakan-pergerakan yang revolusioner muncul. Sikap reaksioner pemerintah kolonial yang seperti ini akan menguntungkan sebab rakyat bumiputra akan semakin terbuka matanya terhadap pergerakan nasional terutama yang mengarah kepada gerakan nonkooperasi. Mengenai munculnya ordonansi pendidikan partikelir yang baru, *Daulat Ra'jat* menulis:

“Pengekangan kemerdekaan ra’jat Indonesia oentoek mengadakan sekolah partikelir ini adalah jang bererti sebenar-benarnja oentoek “menambah kepertjajaan ra’jat Indonesia ini” dan ta’ lain ta’ boekan hanja sebagai penambah keras pengekangan dari pergerakan kemerdekaan kita. Dengan tangan besi ini makin akan meloeas pergerakan—non-cooperation—politik, karena bertambah keinsjafan ra’jat jang banjak itoe.

. . . Djika kita membitjarakan soal onderwijs dari katja mata pergerakan kemerdekaan kita, maka soedah seharoesnja poela kita memerdekakan diri dari Onderwijs Belanda jang penoeh pengekangan itoe.”²⁰⁸

Mohammad Hatta menulis sebuah artikel yang berjudul “Non-Cooperatie Boekan Non-Actie”.²⁰⁹ Artikel tersebut membahas sikap pergerakan nonkooperasi terhadap ordonansi ini. Pada artikel tersebut Hatta menerangkan garis pergerakan nonkooperasi yang bukan berarti tidak bereaksi apabila pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah kebijakan yang merugikan rakyat bumiputra. Hatta sendiri menilai bahwa ordonansi ini bersifat elastis sehingga memberi kesempatan yang luas bagi pemerintah kolonial untuk menindas sekolah-sekolah bumiputra. Dan mengenai sikap gerakan nonkooperasi terhadap munculnya ordonansi baru ini, Hatta menekankan:

“ Dalam keadaan jang seperti itoe timboel pertanyaan dalam hati kita: Wadjiblah kita menentang ordonnantie itoe atau tidak?

Ada kawan jang mengatakan tidak, karena sebagai kaoem non-cooperator kita tidak memperdoelikan apa jang dikerdjakan atau diperboeat oleh pemerintah. Kalau kita memprotest, kita mendjadi kaoem cooperator.

Betoelkah anggapan itoe?

Tidak! Pendirian jang sematjam itoe bertentangan sekali dengan politik non-cooperation. Non-cooperatie ialah dari semoelanja actie, dan boekan non-actie! Actie kita menentang segala halangan jang maoe mengikat langkah kita.

²⁰⁸ *ibid.*

²⁰⁹ Mohammad Hatta, “Non-Cooperatie Boekan Non-Actie”, *Daulat Ra’jat*, 10 November 1932 no. 42.

Maksoed politik non-cooperatie ialah menarik garis antara sana dan sini, soepaja njata bagi kita roepa pekerdjaan kita dan bangoen masjarakat atau pergaoelan hidoep kita sendiri.”²¹⁰

Selanjutnya Hatta menjelaskan secara mendetail mengenai pergerakan nonkooperasi yang pada dasarnya menarik garis pemisah antara bumiputra dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagai bentuk nyata dari pemisahan tersebut, Hatta menjelaskan bahwa gerakan nonkooperasi menolak *Volksraad* yang dianggap sebagai alat pemerintah kolonial agar status negeri jajahan tetap bertahan selamanya. Namun demikian Hatta mengungkapkan bahwa sikap penolakan tersebut bukan berarti gerakan nonkooperasi tidak bereaksi terhadap tindakan pemerintah yang menyerang kepentingan rakyat bumiputra. Pada akhir tulisannya, Hatta kembali menyatakan bahwa aksi penentangan terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” merupakan bagian dari gerakan nonkooperasi.

“ Sampai sekarang pergerakan ra’jat kita menentang dengan actie segala pagar oendang-oendang jang menjempitkan kita bergerak dan berdjoang. Oleh karena itoe, soedah pada tempatnja kalau sekarang pergerakan kita memperlihatkan poela kemaoeannja, menjoesoen kemaocan ra’jat oentoeek menentang ordonnantie tentang “wilde scholen”. Actie jang demikian itoe memang terletak didalam garis politik non-cooperatie. Kalau kita diam sadja, itoe ertinja non-politik dan boekan poela non-actie. Ia (non-cooperatie) melainkan actie!

Sebab itoe. Ra’jat Indonesia. Berdjoanglah dengan tidak berkepoetoesan!”

Sjahrir yang mempunyai nama pena *Real Politiker* menulis tajuk rencana yang berjudul “Menentang Ordonnantie Sekolahan Liar”.²¹¹ Artikel tersebut pada dasarnya menanggapi keputusan PPPKI yang mendukung aksi penentangan Ordonansi

²¹⁰ *ibid.*

²¹¹ *Daulat Ra’jat*, 30 November 1932 no.44.

“Sekolah Liar” dan melakukan *massa-actie*. Sjahrir menggambarkan aksi-aksi menentang Ordonansi “Sekolah Liar” yang sudah menembus berbagai organisasi bumiputra dari berbagai golongan termasuk golongan yang sebelumnya tidak terjun ke dalam dunia politik.

“ Menilik kegemparan jang telah timboel karena moentjoelnja ordonnansi ini, poen djoega didalam kalangan jang biasanja menghindarkan politik, seperti Mohammadyah dan Taman Siswo serta berpoeloeh golongan social jang lain, seperti sekalian pergoeroean-pergoeroean Ra’jat d.l.l., dan poela P.P.P.K.I. jang teroetama terdiri dari kaoem co, atau kaoem jang pertjaja bahwa dapat dipertahankan kepentingan Ra’jat Indonesia didalam raad-raad. Menilik ini sekalian maka dapatlah kita mengatakan bahwa ordonnansi sekolahan “liar” ini telah membangoenkan perhatian politik dari bagian besar dari Ra’jat kita, djoega didalam kalangan jang biasanja menghindarkan (mendjaoehi) politik seperti menghindarkan penjakit menoelar.”²¹²

Sjahrir kemudian menyatakan bahwa kaum nonkooperasi juga harus ikut serta dalam momen ini dimana Ordonansi “Sekolah Liar” ini telah membangkitkan perhatian politik di kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kaum nonkooperasi seperti PNI-Baru harus memanfaatkan momen ini untuk mengajarkan rakyat bumiputra bergerak dan berjuang politik, seperti yang telah dituliskan dalam artikel tersebut:

“ Ini djoega bagi kaoem non, djoega bagi kaoem jang teroetama mementingkan politik principieel (berazas) dan perdjoangan principieel, djanganlah menganggap bahwa pertentangan ini terketjil sджа, bahwa ordonnansi sekolah “liar” ini membangoenkan perhatian politik Ra’jat, dan bahwa disini tempat oentoek mengadjar Ra’jat bergerak dan berdjoang politik.”²¹³

²¹² *ibid.*

²¹³ *ibid.*

Siswarahardja menulis sebuah artikel yang berjudul “11 December 1932”.²¹⁴ Artikel tersebut berisi tanggapan redaksi atas pelaksanaan *massa-actie* menentang Ordonansi “Sekolah Liar” yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1932, khususnya di sebuah rapat umum yang diadakan oleh “kaoem kiri” di Surabaya.²¹⁵ Rapat umum yang digelar di Surabaya pada akhirnya dibubarkan, namun artikel tersebut menyatakan kepuasannya karena pengaruh “kaoem kiri” dalam rapat umum tersebut mengena ke dalam sanubari rakyat.

“ Pada rapat terboeka itoe kaoem kiri merasa poeas hatinja, karena ra’jat tampak persetoedjoeannja, setoedjoe dengan pendiriannja. Dari itoe diminta dengan ichlas hati, persetoedjoeannja itoe diboektikan. Ertinja bila ada oendangan dari partainja haroeslah datang, sedia tenaga, sedia kekoeatan goena membatalkan Onderwijs-ordonnantie itoe. Seperti pemerintah membatalkan openlucht dan optocht terseboet.

Kaoem kiri bilang, bila Onderwijs-ordonnantie itoe tiada batal, Indonesia sebagai “mati sadjroning oerip” (mati di dalam hidoep.corr). Djasmaninja hidoep, rochaninja mati, djadi persis sebagai perkakas bernjawa. Sebab adanja Onderwijs-ordonnantie itoe terang menghalang madjoenja peladjaran dan pendidikan jang setoedjoe dengan kemaean ra’jat, jalah kemaean jang achirnja bisa memerdekakan lahir batin. Merdeka wiraga dan wiramanja, sedangkan kebangsaan dan kemaoesiaannja bisa sembeng rapet.”²¹⁶

Pada akhir artikel ini, *Daulat Ra’jat* menegaskan kembali bahayanya ordonansi tersebut apabila dilaksanakan sepenuhnya. Dan memberikan sedikit nilai ancaman terhadap orang bumiputra yang setuju terhadap ordonansi tersebut. Seperti yang dituliskan dalam tulisan tersebut: “ *Onderwijs-ordonnantie itoe hanja dapat memberi djalan oentoek pesatnja, koloniaal onderwijs, mendjalarnja pendidikan jang*

²¹⁴ *Daulat Ra’jat*, 20 Desember 1932 no.46.

²¹⁵ *Daulat Ra’jat* menyebut pergerakan nonkooperasi adalah “kaoem kiri”, sedangkan untuk pergerakan berhaluan kooperasi dan pergerakan tidak radikal lainnya adalah “kaoem kanan”.

²¹⁶ *ibid.*

dapat merobohkan “goenoeng kebangsaan”. Dari itoe patoet sekali bila orang-orang di sini jang setoedjoe dengan adanja Onderwijs-ordonnantie itoe, dikeloearkan dari oemat kita, tiada disetoedjoei mengakoe Indonesiers; sebab memberi maloe!”²¹⁷

Seorang penulis dengan nama samaran Guru Marhaen menulis sebuah artikel yang berjudul “Ordonansi Sekolah “Liar””.²¹⁸ Artikel tersebut pada dasarnya kembali mengulas secara umum pengertian Ordonansi “Sekolah Liar” dan bahayanya serta perkembangan aksi penentangan rakyat bumiputra yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakannya. Sama halnya seperti tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini juga menyatakan bahwa Ordonansi “Sekolah Liar” sepenuhnya sudah ditolak sebagian besar masyarakat bumiputra, baik berasal dari golongan yang berpolitik maupun yang tidak berpolitik, kaum kooperator dan nonkooperator, sampai kepada lapisan bawah masyarakat bumiputra. Namun demikian ciri khas dari opini yang dibuat oleh media yang berlatar-belakang haluan nonkooperasi adalah selalu mengaitkan dengan masalah penjajahan dan kemerdekaan. Guru Marhaen menuliskan bahwa momen perlawanan yang menyebar kepada segenap masyarakat luas bumiputra merupakan gerakan rakyat menuju tahapan berikutnya yakni menentang penjajahan dan menuju kemerdekaan bangsa bumiputra.

“ Kebangoenan Ra’jat jang terdapat oleh ordonnansi sekolah “liar” ini, kelak akan melangsoengkan langkahnja kelapang jang lebih loeas dan akan mendjadi keinsjafan dan ketegoehan Ra’jat Indonesia jang kelak semakin lama semakin besar, dan achirnja dapat memerdekakan tanah air Indonesia bersama Ra’jatnja.

²¹⁷ *ibid.*

²¹⁸ *Daulat Ra’jat*, 10 Januari 1933 no.48.

Oleh karena itoe Ra'jat Indonesia toendjoekkanlah kesadaranmoe, dan tegoeuhkanlah pendirianmoe!”²¹⁹

Pembahasan mengenai hubungan antara PNI-Baru dengan Ordonansi “Sekolah Liar” dibahas dalam artikel berjudul “Pendirian Revoloesioner” yang ditulis oleh penulis berinisial *D.S.*²²⁰ Di dalam artikel tersebut disebutkan Ordonansi “Sekolah Liar” memberikan jalan bagi PNI-Baru untuk menyadarkan rakyat bumiputra akan kondisi yang terjajah.

“ Soal ordonnantie liar menentang sekolah partikoelir (lebih benar: kebangsaan!!!) jang dihadiahkan pada ra'jat Indonesia, roepanja dan terboekti berfaedah benar bagi pergerakan kera'jatan dan memperkoeatkan benteng nasional kita dalam aksinja menentang lawan. Kenjataan ini dan tindakan-tindakan reaksi terhadap pada perhimpoeenan P.N.I., jang mendjadi motor dan obor ra'jat dalam perdjalanan kearah kesentausaan dan keselamatan, keadaan ini semoea tidak mengedjoetkan dan mengherankan kita, oleh karena dari systeem kolonial semoea tindakan, jang ditoedjoekan pada memperkoeat dan mengekal perkolonialan dapat diharap, melainkan hanja menegoehkan semangat perdjoeangan dan mempertadjam sikap, haloean dan roepa perdjoeangan kemerdekaan kita.”²²¹

Inoe Perbata Sari menulis sebuah artikel yang berjudul “Pendidikan atau Onderwijs Nasional; Arti dan Goenanja”.²²² Artikel itu membicarakan kepentingan pendidikan yang berbeda antara negara yang bangsanya merdeka dan di negara yang bangsanya terjajah. Di negara yang bangsanya merdeka, Inoe Perbata Sari mengatakan bahwa pendidikan secara umum diutamakan untuk memberikan keahlian kepada warganya agar bisa mencari pekerjaan setelah ia lulus nanti. Hal ini ia katakan

²¹⁹ *ibid.*

²²⁰ *Daulat Ra'jat*, 30 Januari 1933 no.50.

²²¹ *ibid.*

²²² Inu Perbata Sari, “Pendidikan atau Onderwijs Nasional; Arti dan Goenanja”, *Daulat Ra'jat*, 10 Februari 1933 no.51.

terkait dengan kemajuan negara tersebut, dimana kemajuan negara adalah ditentukan dengan kemajuan serta kemakmuran rakyatnya. Sedangkan untuk rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negaranya diselipkan sedikit demi sedikit dalam setiap pelajaran namun tidak terlalu ditonjolkan. Inoe Perbata Sari mengatakan bahwa anak-anak pelajar di negeri yang merdeka masih mempunyai banyak waktu untuk memikirkan bangsanya sewaktu ia telah dewasa.

Berbeda dengan pendidikan di negeri jajahan, Inoe Perbata Sari menyatakan bahwa di negeri jajahan seperti Hindia Belanda, pendidikan yang diberikan secara resmi oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan penjajahan. Rakyat jajahan diajarkan hanya untuk menjadi buruh dengan upah yang murah dimana dalam setiap pengajarannya rakyat jajahan semakin dijauhkan dengan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsanya. Inoe Perbata Sari mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan kepentingan terselubung penjajah yang menginginkan rakyat yang dijajahnya tetap dalam kondisi kebodohan. Inoe Perbata Sari juga memberikan perbandingan anggaran dan kesempatan pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial terhadap anak-anak bumiputra sangat timpang dengan anak-anak Belanda atau Eropa lainnya di Hindia Belanda.

Kondisi yang demikian membuat rakyat bumiputra membuat lembaga pendidikannya sendiri dimana dalam sekolah tersebut tidak hanya diajarkan ilmu dan wawasan umum tetapi juga rasa kebatinan yang membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsanya, seperti yang dituliskan dalam kutipan di bawah ini:

“ Pendidikan bagi anak-anak kita selainnja oentoek menambah pengetahuan dan persiapan oentoek perdjoeangan di dalam pergaoelan hidoep oentoek mentjari nafkah adalah teroetama sekali haroes mendapat pendidikan kebathinannya, jaitoe ia haroes mempoenjai semangat tjinta kepada bangsa dan tanah airnja; satoe pembela bangsa haroes poela mempoenjai semangat jang mendjaoehi dari pada semangat perboeroehan atau perboedakan. Kebathinan anak-anak kita dari ketjil haroes didjaga, soepaja kalau besar bisa mendjadi satoe manoesia jang bergoena bagi pergaoelan bangsanja, bisa mendjadi pembela bangsa didalam kedadjoean ra’jatnja.”²²³

Inoe Perbata Sari kemudian menyebut bahwa upaya ini mendapat hambatan dari ordonansi sekolah partikelir yang baru itu. Inoe Perbata Sari pada akhir naskah pidatonya kembali menyerukan untuk menolak ordonansi tersebut.

“Tolaklah bahaja jang akan mengantjam pendidikan dan pergoeroean anak-anak kita ini jang mana bisa berbahaja bagi kedadjoean dari bangsa kita karena kalau sampai sekolah-sekolah kita banjak jang tertoeoep, tjilakalah anak-anak kita itoe karena tidak dapat kesempatan oentoek mendidik anak-anak kita sebab sekolah-sekolah pemerintah sendiri tidak tjoekoep dan tidak bisa memoeaskan keboetoean Ra’jat kita jang banjak itoe.”²²⁴

Artikel yang berupa naskah pidato yang dibuat oleh Inoe Perbatasari ini adalah artikel terakhir yang membahas mengenai Ordonansi “Sekolah Liar”. *Daulat Ra’jat* beberapa edisi berikutnya memuat maklumat Ki Hadjar Dewantara yang berisi mengenai berakhirnya aksi penentangan tersebut.²²⁵

²²³ *ibid.*

²²⁴ *ibid.*

²²⁵ *Daulat Ra’jat*, 10 Maret 1933 no.54 tahun ke-III. Maklumat tersebut berjudul “Penentangan O.O. Liar dan Kesoedahannya”.